



LAPORAN KINERJA(LKJ) TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
JL. A. SYAIRANI KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA PELAIHARI 70814
TELP. (0512) 21863 NO. FAXIMILE (0512) 21009

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai perwujudan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pelaihari, Januari 2022



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Pembina TK. I (IV/b)
NIP.196803041998031009

IKHTISAR EKSEKUTIF



Ir. H. Muhammad Mursyi, M. Si
Sekretaris DPRD Kab. Tanah Laut

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 merupakan Wujud Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini ketiga RPJMD 2018-2023. Selain Media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, laporan kinerja juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus menggambarkan keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 (satu) sasaran yang diukur oleh 1 (satu) indikator kinerja utama dan 4 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 11 (sebelas) indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan /Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis diatas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Baik**. Hal ini berdasarkan pada hasil pengukuran target pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan Tahun 2022 terhadap realisasi pencapaian target Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap 1 (satu) sasaran 1 (satu) indikator kinerja utama dengan tingkat capaian kinerja **sangat memuaskan**. Indikator kinerja Program yang terdiri dari 4 Sasaran dan 11 indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 133,02 % dengan rincian 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori cukup dan 8 indikator kinerja dengan katagori **Sangat memuaskan dan katagori memuaskan**.

Pencapaian Kinerja pada tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun sangat diharapkan kedepannya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 sangat diharapkan dapat mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2022



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP.196803041998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	4
D. Produk dan Layanan	6
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Visi RPJMD	8
B. Misi RPJMD	8
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
D. Indikator Kinerja Utama	11
E. Perjanjian Kinerja	12
F. Program dan Kegiatan	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	19
1. Sasaran RPJMD	19
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut	21
3. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	31
1. Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian	42
4. Kepala Bagian Keuangan	52
1. Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	59
5. Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	64
B. Akuntabilitas Keuangan	71
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022	71
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	77
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022	78

BAB IV. PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Strategi Peningkatan Kinerja	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.....	4
2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023	10
3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	12
4 Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	13
5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	17
6 Misi 3, Tujuan, Sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023	20
7 Indikator Kinerja utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut	21
8 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	22
9 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	22
10 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018 – 2022	23
11 Jumlah Nilai Per Unsur, Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur, Dan Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per Unsur Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun 2022	25
12 Realisasi Program Penunjang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	28
13 Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022	30
14 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	32
15 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022	34
16 Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat per Indikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022	38
17 Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	40
18 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.....	43
19 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022.....	45
20 Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	47

21	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2022	48
22	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2022	49
23	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	52
24	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022	53
25	Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2022	54
26	Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Keuangan Perindikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022	56
27	Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	57
28	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	59
29	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022	60
30	Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	62
31	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	64
32	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019-2022	65
33	Realisasi Dan Target Capaian IKU Kabag Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2019 sd. 2022	68
34	Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	69
35	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	71
36	Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja berdasarkan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	72
37	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	75
38	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	76
39	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022	76
40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.....	77

41	Program, Pagu dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	78
42	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2022	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ...	2
2 Rapat Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Badan Anggaran dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 pada tanggal 9 Agustus 2022.....	63
3 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum RT dan RW Kelurahan se-Kecamatan Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2022.....	66
4 Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propomperda) Kabupaten Tanah Laut, 16 November 2022.....	67
5 Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 17 Mei 2022.....	67

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1 Capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dan Jumlah Peningkatan Capaian Tahun 2018 – 2022.....	24

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

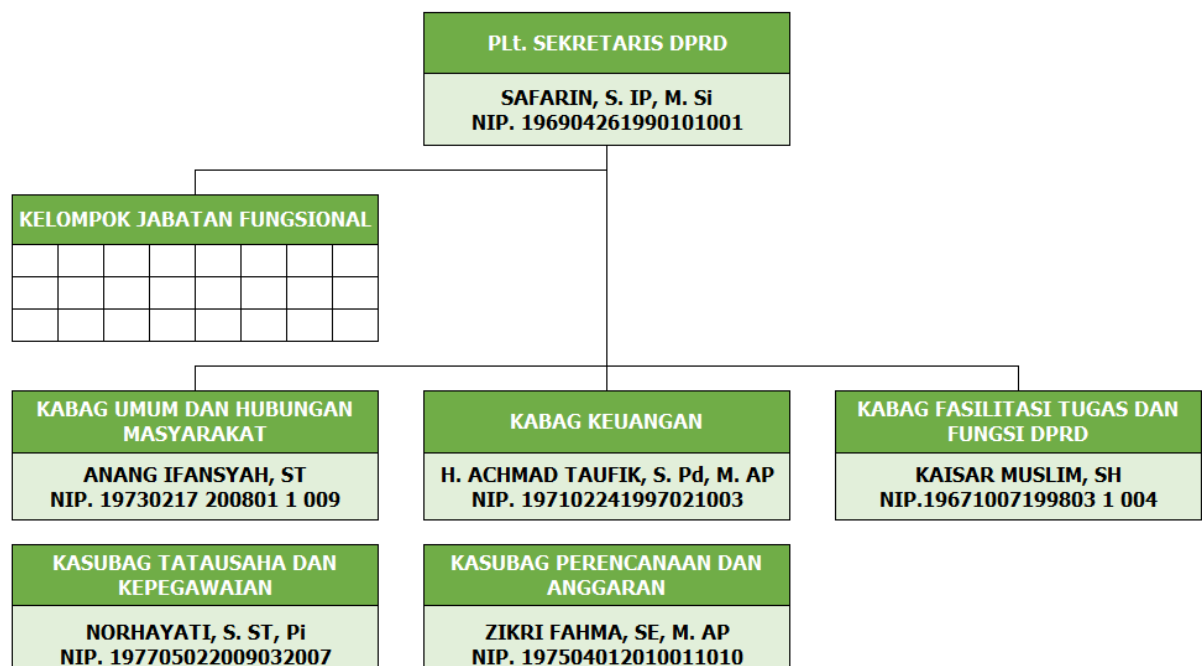
Atas dasar tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (Lkj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan dan media penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang

berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
4. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2022

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

Permasalahan strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut berkaitan erat dengan isu strategis organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi nilai, tingkat dan kombinasi pelaksanaan tugas, biaya organisasi ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sehingga perlu untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan penting yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merumuskan permasalahan strategis yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsinya pada tabel berikut :

Tabel 1. Tugas, Pokok dan Fungsi serta Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Tugas Pokok dan Fungsi			Isu Strategis	
Tugas Pokok	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Administrasi Keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku		1.	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban.
			2.	Belum adanya perubahan pola pikir (<i>mindset</i>) terhadap tugas, pokok dan fungsi akibat adanya tingkat pendidikan aparatur yang berbeda sehingga terdapat ketidak sesuaian antara kemampuan aparatur dengan tugas, pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
			3.	Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam mengikuti diklat sehingga kualitas yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan.
			4.	Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana.
			5.	Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terdapat ketidak serasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian dalam Sekretariat DPRD.
			6.	Distribusi pekerjaan yang kurang merata sehingga terdapat penumpukan volume pada satu Bagian.
Fungsi	a.	penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;	7.	Kurang berfungsinya elemen-elemen penting pada Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja (<i>task environment</i>) Sekretariat DPRD.
	b.	penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;		
	c.	pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;		
	d.	penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;		
	e.	pengelolaan urusan kesekretariatan DPRD.		

Ditinjau dari tugas, pokok dan fungsi SKPD yang mempengaruhi permasalahan serta tinjauan terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan analisis faktor internal dan eksternal maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD.

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, Keputusan DPRD dan Raperda inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat Dewan, kegiatan reses, hearing, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

2. Sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan.

Kondisi sarana dan prasarana persidangan perlu ditingkatkan dengan mengadakan peralatan yang canggih agar agenda persidangan dan pemaparan materi dapat dilaksanakan lebih cepat dan akurat.

3. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi isu yang harus ditindak lanjuti dengan upaya peningkatan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis. Program diklat dan bimtek bidang manajemen pemerintahan, sistem informasi dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.

4. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah masih belum optimal.

Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada peningkatan penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

D. Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang diberikan Sekretariat DPRD adalah berupa pelayanan dalam bentuk fasilitasi semua kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mencakup penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat - rapat DPRD, Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan, fasilitasi kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2021, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II
3. Eselon III

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program
3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2021 dan 2022

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah “ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi) yang berarti adalah :

- | | | |
|----------|---|---|
| Berkarya | : | Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. |
| Inovasi | : | Menciptakan inovasi disegala sendikehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. |
| Tertata | : | Membangun tata kelola pemerintahan yang baik {Good Governance) |
| Religius | : | Meningkatkan kuantitas dan kualitas Religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat |
| Aktual | : | Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat |

B. Misi RPJMD

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 5 (lima) misi tersebut diatas, Sekretariat DPRD termasuk pada Misi ke-3 yaitu “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good Goovernance*)”.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 merupakan salah satu SKPD pelaksana Misi ke 3 (tiga) yaitu : “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik” dan sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD”.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan “**Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD**”. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Meningkatnya kinerja layanan DPRD.
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana, Kualitas SDM dan Kualitas Administrasi Kepegawaian.
3. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan informasi Publik, Kehumasan dan Keprotokolan DPRD.
4. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan Administrasi keuangan Sekretariat DPRD
5. Meningkatnya Fasilitas dalam rangka menunjang Kinerja DPRD

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target 5 tahunan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Urusan Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,07 (Baik)	77,08 (Baik)	77,09 (Baik)	77,1 (Baik)	77,11 (Baik)
			Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolannya DPRD	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi penyebaran informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentasi Rapat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja yaitu, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Tingkat kepuasan Anggota DPRD diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun Target IKU sekretariat DPRD Tanah Laut Tahun 2022 sebesar 77,1 atau katagori Baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab /Sumber data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM) (77,1)	Sekretaris DPRD

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2022 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa

hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi ke depan.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tahun 2022 telah disepakati baik oleh Sekretaris, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan Sub Koordinator sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut		
	1. Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD	1. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Baik (77,1)
2.	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat		
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%
		2. Persentase penyebaran informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%
3.	Kepala Bagian Keuangan		
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)

4.	Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD		
	1. Meningkatkan fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%
		2. Persentase fasilitas pembahasan rancangan Perda	100%
		3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%
		4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%
7.	Kasubbag Tatausaha dan kepegawaian		
	1. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	1. Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2568 dokumen
	2. Melaksanakan fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	2. Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang
	3. Melaksanakan fasilitas Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	3. Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang
	4. Melaksanakan fasilitas pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	4. Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang
	5. Melaksanakan fasilitas pemenuhan tenaga ahli DPRD	5. Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang
8.	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran		
	1. Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	1. Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen

F. Program dan Kegiatan

Tabel 5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.231.786.316
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	94.394.280
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.163.013.501
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104
	JUMLAH	63.394.799.817

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai **Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)** Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 adalah **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** dimana **untuk pencapaian visi** tersebut telah **ditetapkan 5 misi** pembangunan,.

Pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam periode 2018-2023 akan berfokus pada pembinaan desa dan penataan kota (**desa dibina kota ditata**) dengan **bekerja keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas**. Dalam rangka pembinaan desa, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depan akan menjalankan berbagai program pembangunan di setiap urusan kewenangan yang dimiliki untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk penataan kota, program pembangunan yang dijalankan akan berfokus pada upaya mendorong kota menjadi kota yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Pembinaan desa dan penataan kota akan dijalankan secara sinergis antar perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Untuk mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, sesuai tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki Peran dalam pencapaian **misi ke 3 (tiga)** yaitu : **“Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”** sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dengan tujuan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi Informasi dengan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Repormasi pelayanan Publik, Meningkatkan Transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik, Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi daerah dan Kompetensi Aparatur, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Misi 3, Tujuan, Sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

Misi 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goovernance);		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan maturitas Penerapan SPIP.
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi penyelenggaraan pelayanan Publik SKPD.
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Peningkatan pemanfaatan data/informasi berbasis TI untuk mendukung penerapan e-Government

2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

2.1. Target dan Capaian IKU

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon II sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

No.	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Survey indeks kepuasan (IKM)	Sekretaris DPRD

Adapun untuk mengetahui katagori mutu pelayanan berdasarkan nilai interval, nilai interval konversi dan kinerja unit pelayanan pada hasil capaian indeks kepuasan hasil survey yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Realisasi capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan hasil Survey tingkat Kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dengan Indeks Kepuasan sebesar 78,26 atau 101,50% dari target tahun 2022 sebesar 77,1. Berdasarkan Tabel 8 tersebut diatas maka mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan katagori **Baik**.

Realisasi capain kinerja hingga tahun 2022 secara umum telah tercapai dan melampaui target akhir Renstra tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	77,1	78,26	101,50%	77,11

Realisasi capaian kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap layanan Sekretariat DPRD diperbandingkan dengan salah satu instansi sejenis di Indonesia. Sekretariat DPRD diperbandingkan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Berdasarkan sumber data website resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen memiliki nilai IKM sebesar 88,20 dengan jumlah responden 35 orang yang dilakukan pada triwulan 4 tahun 2022. Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen adalah meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD, ini selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD. Dari nilai IKM, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut masih rendah dibandingkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Hal ini perlu tekad dan kebersamaan semua jajaran di sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan layanan agar tingkat kepuasan anggota DPRD meningkat. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut juga menelaah pada sasaran organisasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia (RI) didapatkan informasi sebagai berikut:

Target Indikator Kinerja Program dalam Renstra Setjen DPR RI Periode 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3.22	3.24	3.26	3.28

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPRD RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	AA
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	A	A	A
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Hasil Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	5. Hasil Penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
	6. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2	4	6	8	10
	7. Jumlah Program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"	2	1	1	2	1
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	BB	A	A	A

Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standarteknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber: Bagian Perencanaan, Januari 2021

Pengukuran Capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020

No	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI			
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3.20	3,27	Melebihi target
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas			
	a. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	Sesuai target
	b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	Sesuai target
	c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Sesuai target
	d. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	e. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Sesuai target
	f. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 Unit	2 Unit	Sesuai target
	g. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"	2	1	Belum mencapai target
	h. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	B	A	Melebihi target
3	Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik			

a. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Belum mencapai target
b. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cukup	Baik	Melebihi target

Sumber: <https://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi birokrasi>.

Dari dua tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat dua sasaran organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Sasaran tersebut adalah:

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola Administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal; dan
- b. Menguatnya Kinerja Keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal.

Untuk indikator Kinerja Utama Sekretariat DPR RI Tahun 2020 hampir semua indikator capaiannya sesuai terget atau melebihi target kecuali pada angka 2 poin (g) terkait wujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPRD RI yang berkualitas dengan indikator persentase jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal “B” adalah target 2 terealisasi 1 dengan prosentase realisasi 50%.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memiliki pencapaian yang sama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam capaian kinerja yaitu melebihi target yang telah ditetapkan. Yang membedakan adalah penetapan target dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut jauh lebih tinggi dari pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Target Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah 77,1 sedangkan target Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2022 adalah 3,24.

2.2. Uraian dan Analisis Capaian IKU

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD terealisasi dengan tingkat Baik (nilai 78,26) dari target Baik (nilai 77,09), sehingga dapat dilihat capaiannya adalah 101,5 %.

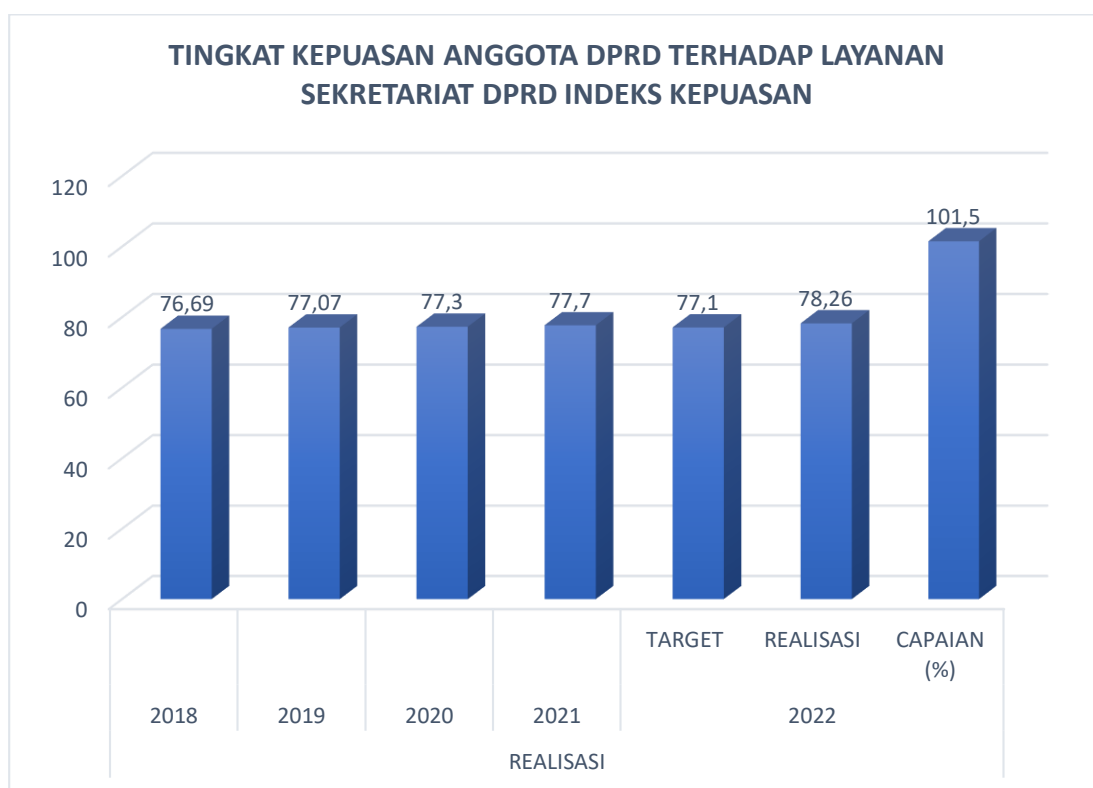
b. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi IKU sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sampai dengan 2022 terjadi trend peningkatan capaian kinerja. Peningkatan kinerja setiap tahunnya meningkat dari 0,23 - 0,56. Sekalipun trendnya meningkat, tapi di tahun 2019 ke 2020 peningkatan capaian menurun (0,23) dibandingkan dari tahun 2018 ke 2019 (0,38). Walaupun demikian peningkatan secara signifikan meningkat pada

tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,56 point. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan grafik 1.

Tabel 10. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2018 - 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI						
		2018	2019	2020	2021	2022		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Indeks kepuasan	76,69	77,07	77,3	77,7	77,1	78,26	101,5



Grafik 1. Capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dan Jumlah Peningkatan Capaian Tahun 2018 – 2022

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada Kegiatan Survey kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dalam mengevaluasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut. Adapun Jenis pelayanan yang disurvei adalah:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Kemudahan prosedur pelayanan
3. Kecepatan pelayanan
4. Kepuasan dalam pelayanan kegiatan
5. Kesesuaian antara hasil produk layanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan/standar pelayanan.
6. Kompetensi/kemampuan petugas atau aparatur dalam memberikan pelayanan
7. Sikap dan perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas dalam memberikan pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam memberikan pelayanan
9. Penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan.

Jumlah nilai unsur tertinggi ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai unsur terendah ada pada unsur sarana dan prasarana. Jumlah nilai IKM unit pelayanan sebesar 78,26 Hasil nilai unsur pelayanan berdasarkan jumlah nilai per unsur, jumlah nilai rata-rata per unsur, dan jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur, IKM per unsur dan IKM Unit Pelayanan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Jumlah Nilai Per Unsur, Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur, Dan Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per Unsur Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Pimpinan Dan Anggota DPRD Tahun 2022

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Σ Nilai Per Unsur	110	113	106	105	107	108	112	100	126
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3,14	3,23	3,03	3,00	3,06	3,09	3,20	2,86	3,60
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0, 111	0,35	0,36	0,34	0,33	0,34	0,34	0,36	0,32	0,40
IKM Per unsur	8,72	8,96	8,40	8,33	8,48	8,56	8,88	7,93	9,99
IKM Unit Pelayanan	78,26								

Berdasarkan hasil survey nilai IKM Unit pelayanan memperoleh nilai 78,26. Nilai tersebut berada pada rentang nilai interval konversi 76,61-88,30 dengan mutu pelayanan B yang berarti kinerja unit pelayanan ada pada katagori **Baik**.

Berdasarkan tabel 8, jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) perunsur diperoleh data 4 unsur memiliki nilai interval berada pada kisaran nilai 2,60 – 3,064 dengan mutu pelayanan **C (Kurang baik)** yaitu waktu pelayan (U3), pelaksanaan kegiatan (U4), produk layanan (U5) serta sarana dan prasarana (U8). Sedangkan 4 unsur lainnya berada pada kisaran nilai 3, 0644-3,53 dengan mutu pelayanan **B (baik)** yaitu unsur persyaratan (U1), prosedur pelayanan (U2), kompetensi petugas (U6) dan perilaku petugas (U7). Satu unsur yang memiliki nilai interval 3,6 yang masuk dalam katagori **A (sangat baik)** yaitu unsur penanganan terhadap pengaduan saran dan masukan.

Nilai IKM Unit pelayanan yang dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 masih bisa dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan agar kinerja unit pelayanan kedepannya bisa lebih baik/meningkat.

Dari hasil survey yang dilaksanakan tersebut menghasilkan mutu pelayanan dengan kinerja baik dalam rangka memberikan pelayanan oleh sekretariat DPRD terhadap pengguna layanan yang dalam hal ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Namun perlu disadari bahwa bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada “pelanggan” yang dalam hal ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut masih mempunyai kekurangan-kekurangan, sebagaimana pendapat responden yang masih merasakan hal-hal kekurangan tersebut. Mutu pelayanan dengan kinerja baik tersebut adalah capaian yang harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang. Semua unsur penilaian perlu mendapat perhatian, terutama unsur-unsur yang masih masuk dalam katagori C. Kekurangan-keurangan diatas harus segera diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa mendatang antara lain :

- a) Perbaiki sistem dan tata kerja untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan dan memberikan kecepatan dalam memberikan pelayanan serta pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pengguna layanan.
- b) Peningkatan sarana dan prasarana fisik pendukung dalam rangka memfasilitasi seluruh kegiatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- c) Melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap para pegawai Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan.
- d) Melakukan *reward* dan *punishment* dalam organisasi Sekretariat DPRD yang akan dapat membawa pengaruh positif terhadap organisasi. dimana :

- Mekanisme dan sistem kerja akan menjadi lebih baik, karena adanya tolak ukur kinerja yang jelas,
- Kinerja individu dalam organisasi semakin meningkat, karena adanya sistem pengawasan yang obyektif dan tepat sasaran,
- Adanya kepastian indikator kinerja yang menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitatif tingkat pencapaian kinerja para individu organisasi.

d. Analisis Program penunjang

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD di dukung oleh 2 (dua) Program penunjang, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 5 (halaman 17) bab II.

Program penunjang dengan pagu Rp. 63.394.799.817.- (*Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah.-*). dan realisasi sebesar Rp. 50.101.531.416.- (*Lima Puluh Milyar Seratus Satu Juta Dua Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah.-*). atau 79,03 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Realisasi Program Penunjang Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.231.786.316	16.694.263.024	63,64
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.163.013.501	33.407.268.392	89,89
JUMLAH		63.394.799.817	50.101.531.416	79,03

Dari tabel 12 tersebut diatas, jumlah realisasi terendah ada pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu sebesar Rp. 16.694.263.024.- (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua*

Puluh Empat Rupiah.-) dari pagu Rp. 26.231.786.316 (*Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah.-)* dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 63,64% dari pagu program dan 26,33 % dari Pagu Total Anggaran Tahun 2022.

Serapan tertinggi ada pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai Rp. 33.407.268.392 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah.-)* dari pagu Rp. 37.163.013.501 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Satu Rupiah.-)* dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 89,89% dari Pagu Program dan 52,70% dari Pagu Total Anggaran Tahun 2022.

Secara keseluruhan realisasi keseluruhan program adalah sebesar Rp. 50.101.531.416 (*Lima Puluh Milyar Seratus Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah)* dari pagu 63.394.799.817 (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah.-)* dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 79,03% .

Realisasi Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 per sasaran per indikator tujuan/sasaran ada yang melampaui target setiap tahunnya, namun ada juga yang menurun realisasinya setiap tahun. Namun secara keseluruhan rata-rata pesentase realisasi indikator tujuan mencapai 133,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Adapun Persentase Capaian target tahun 2022 terhadap target akhir renstra adalah jumlah realisasi tahun 2022 dibagi target tahun 2023 dikali 100, sehingga dapat dilihat dalam perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2022}}{\text{Target Kinerja Tahun 2023}} \times 100$$

Tabel 13. Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022

[illegible]

e. Analisis atas penggunaan Sumberdaya

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja Sekretaris DPRD maka diperlukan sumberdaya (anggaran dan SDM) yang memadai yaitu Sumberdaya manusia yang kompeten, dan sumberdaya yang mencukupi serta sarana prasarana yang memadai.

Kondisi ideal di Sekretariat DPRD adalah jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan dalam analisa jabatan sebanyak 54 orang. Kondisi saat ini jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan sebanyak 33 orang per 31 Desember 2022. Masih dibutuhkan 21 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah menyampaikan usulan kekurangan jabatan yang ada ke BKPSDM untuk formasi jabatan CPNS/PPPK. Selain itu mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menaruh PTT/pegawai non PNS agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.

penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Adapun serapan Anggaran Sekretariat DPRD dilihat pada tabel 12 diatas jumlah serapan sebesar 79,03%. Dibandingkan dengan persentase realisasi capaian indikator kinerja esselon II sebesar 101,5% maka dapat dihitung efisiensi anggaran adalah persentase capaian IKU dikurang persentase serapan anggaran sehingga diperoleh 22,47%.

1. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran Strategis Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian memiliki 4 indikator yaitu 1). Persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dengan realisasi 100,23 % dari target 100 %, 2). Persentase pemenuhan tenaga ahli dengan realisasi 320 % dari target 100 %, 3). Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana dengan realisasi 251,92 % dari target 100% dan 4). Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan realisasi 67,37 % dari target 100 %.

Sasaran strategis ke-2 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan publik dengan 2 indikator kinerja yaitu 1). persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya dengan realisasi 176 % dari target 100% dan 2). Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dengan realisasi 107,7 % dengan target 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	1. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100,23 %	100,23
		2. Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	320 %	320,00
		3. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	251,92 %	51,92
		4. Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	100%	67,37 %	67,37
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolannya DPRD	1. Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	176 %	176
		2. Persentase penyebaran informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	107,7%	107,7

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian realisasi per indikator kinerja dengan target 100% untuk semua indikator kinerja memiliki realisasi capaian kinerja yang kurang dari 100% adalah indikator Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia (67,37 %).

Realisasi indikator kinerja yang lebih dari 100% ada 5 indikator satu diantaranya mencapai lebih 3 kali lipat dari target yaitu Persentase pemenuhan tenaga ahli (320%) dan yang lain adalah Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana (251,92%), persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya (176%), Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib (100,23%) dan Persentase

penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD (107,7%) .

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dibandingkan tahun 2019 sebesar 100% terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 5,3 % dan tahun 2021 sebanyak 5,6%. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan mencapai 100,23% dari target 100%.

Peningkatan yang signifikan terjadi pada capaian persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD dari capaian 100% pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 320% pada tahun 2021 dan 2022.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana meningkat pada tahun 2021 sebanyak 114,28% dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 100%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan hingga 251,92% dari target 100%.

Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia menurun dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan terjadi sejak tahun 2020 yang mencapai 80% dan 2021 sebesar 66,29%. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan 1,08 point dibandingkan tahun 2021 yaitu 67,37%.

Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya meningkat pada tahun 2021 sebesar 127,19% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 97,25% dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 48,81 point menjadi 176%.

Persentase realisasi penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mencapai 100% dari target dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 166%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi sebanyak 58,3% menjadi 107,7%.

Persentase capaian kinerja terhadap target akhir renstra tahun 2023 dihitung dari realisasi target 2022 dibagi target tahun 2023 dikali 100. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022

Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100%	94,70%	94,04%	100,23%	-	100%	100,23
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	320%	320%	-	100%	320,00
	Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	100%	100%	114,28%	251,92%	-	100%	251,92
	Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	89,00%	80,00%	66,29%	67,37%	-	100%	67,37
	Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	100%	97,25%	127,19%	176%	-	100%	176,00
	Persentasi penyebaran informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	100%	100%	166%	107,70%	-	100%	107,70

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib bersumber dari dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani tahun 2022 merupakan data yang bersumber dari aktivitas organisasi yang bersumber dari kegiatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar serta dokumen kepegawaian yang dikelola. Untuk meningkatkan indikator kinerja, langkah kedepan yang harus diambil oleh Sekretariat DPRD adalah :

- memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;
- mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian;
- Meningkatkan pembinaan untuk mencapai kesejahteraan pegawai;
- Meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian.

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian yaitu menyeimbangkan jumlah pegawai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD, menyesuaikan beban kerja yang ada dengan jumlah pegawai. Hal ini dilakukan untuk memastikan porsi atau kapasitas pekerjaan setiap pegawai sesuai dengan kemampuan dan beban kerjanya. Hasilnya di beberapa bagian masih kekurangan jabatan fungsional umum yang berdampak pada kemampuan dan beban kerja yang lebih. Solusi yang diambil adalah menyampaikan surat permintaan jabatan fungsional umum ke BKPSDM baik melalui mutasi ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut maupun melalui Penerimaan CPNS dan PPPK.

Kegiatan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah berasal dari realisasi Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD yang difasilitasi tahun 2022 adalah merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi ASN dalam bentuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan lembaga resmi, dimana terlaksana sebanyak 11 orang (73,33%) dari target 15 orang dan diklat/bimtek anggota DPRD yang ditargetkan 175 orang hanya terealisasi 117 orang (66,86%). Realisasi dari 2 kegiatan tersebut diperoleh rata-rata capaian 67,37%. Tidak tercapainya target diklat/bimtek Anggota DPRD pada akhirnya sangat mempengaruhi realisasi keseluruhan untuk indikator kinerja persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tahun berikutnya agar pejabat yang mengelola kegiatan agar lebih tepat dalam menyusun perencanaan, anggaran dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi realisasi capaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD tercapai 320% dari target 100%. Capaian ini terpenuhinya tenaga ahli sebanyak 1 orang untuk masing-masing komisi I, komisi II, komisi III, banggar, bapemperda dan masing-masing fraksi dengan jumlah keseluruhan

16 orang dari target 5 orang pada tahun 2022. Secara khusus Tenaga Ahli mempunyai tugas untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi kepada Anggota Dewan, Alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan adanya bantuan tenaga ahli, kemampuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat lebih meningkat dan berkualitas sehingga menguasai materi muatan dan substansi peraturan dewan.

Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana mencapai 251,92% dari target 100%. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana meliputi pengadaan sarana prasarana tahun 2022 yang mencapai realisasi 91 jenis dari target 45 jenis dengan persentase realisasi sebesar 202,22% dan pemeliharaan sarana prasarana yang mencapai 40 unit dari target 7 unit dengan persentase realisasi sebesar 571,43%. Peningkatan realisasi drastis akibat adanya penambahan belanja sarana prasarana dan pemeliharaan sarana prasarana pada anggaran perubahan tahun 2022. Peningkatan pemenuhan layanan sarana dan prasarana diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kepuasan dan mempercepat proses kerja sehingga produktivitas kegiatan meningkat.

Pelayanan kehumasan dan keprotokolan kegiatan DPRD oleh sekretariat DPRD meliputi:

1. penyiapan rumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang informasi dan pemberitaan,
2. pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi; serta penyelenggaraan kebijakan bidang informasi dan pemberitaan,
3. pengelolaan pengaduan serta protokol dan dokumentasi.

Jumlah Pelayanan dihitung dari jumlah terlaksananya pelayanan kehumasan dan keprotokolan terhadap rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan serta kegiatan

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD selama tahun 2022.

Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya terdiri dari jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan terealisasi 474 kali dari target 459 dan jumlah kegiatan ke protokol yang difasilitasi terealisasi 295 kali dari target 255 kali. Total realisasi capaian keseluruhan mencapai 107% dari target 100%.

Kegiatan penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD tahun 2022 mencapai 88 kali dari target 50 kali dengan persentase realisasi sebesar 176% pada Tahun 2022 penyebarluasan informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD dilakukan melalui beberapa media cetak antara lain B.Post, Barito Pos, Radar Banjarmasin, Duta TV dan melalui media online lainnya.

Perhitungan persentase realisasi capaian sub indikator kinerja dan persentase realisasi capaian indikator kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian sub IKK} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun ke-n}}{\text{Jumlah target Tahun Ke-n}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian IKK} = \frac{\text{Jumlah Realiasi sub IKK tahun ke-n}}{\text{Jumlah Target sub IKK thn ke-n}} \times 100$$

Tabel 16. Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat per Indikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022				
					Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	94,70%	94,04%	100%	100,23%	100,23%	100%	100,23
	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani (dokumen)	2639	2432	2415	2568	2574	100,23	2568	100,23
	Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD	100%	100%	320,00%	100%	320%	320%	100%	320
	Jumlah tenaga ahli yang disediakan (orang)	3	4	16	5	16	320%	5	320,00
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100%	100%	114,28%	100%	251,92%	251,92%	100%	251,92
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	80	50	45	45	91	202%	45	202,22
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	43	7	9	7	40	571%	7	571,43
	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya manusia	89%	80%	66,29%	100%	67,37%	67,37%	100%	67,37
	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi (orang)	11	12	15	15	11	73,33	15	73,33
	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi (orang)	210	33	57	175	117	66,86	175	66,86
	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya (orang)	33	0	32	35	32	91,43	35	91,43
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100%	100%	166%	100%	107,70%	107,70%	100%	107,7
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (kali)	-	592	561	459	474	103,27	459	103,27
	Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi (kali)	53	248	337	255	295	115,686	255	115,69
	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100%	97,50%	127,19%	100%	176%	176%	100%	176
	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose (kali)	10	50	83	50	88	176	50	176,00

4. Analisis Program Penunjang

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 mengampu 2 program, 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 10.038.720.948.- (*Sepuluh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah.-*). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.590.768.725.- (*Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah.-*) dengan realisasi capaian persentase keuangan sebesar 75,61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.647.819.207	2.201.971.373
<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>		
<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	405.495.000	336.000.000
<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	778.261.715	466.744.776
<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	2.164.425.000	1.126.384.097
<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	299.637.492	272.842.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.390.901.741	5.388.797.352
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	323.500.000	101.948.786
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	29.591.393	17.328.650
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	2.141.497.250	2.075.210.765
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	11.304.939	10.308.332
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	24.586.745	40.409.118
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		
<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	70.000.000	57.957.000
<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	405.193.250	325.775.900
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	202.500.720	130.180.000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	234.833.680	166.848.226
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	215.925.851	153.256.300
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	66.670.000	33.519.800
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	190.939.534	137.780.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.172.858.967	945.727.522
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	16.241.100	14.034.157
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	311.290.912	258.810.236
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	973.967.400	919.702.560
JUMLAH	10.038.720.948	7.590.768.725

5. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja di Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD maka diperlukan sumberdaya (anggaran dan SDM) yang memadai yaitu Sumberdaya manusia yang kompeten, dan sumberdaya yang mencukupi serta sarana prasarana yang memadai.

Kondisi ideal di Bagian Umum Sekretariat DPRD jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan dalam analisa jabatan sebanyak 23 orang. Kondisi saat ini jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan jabatan sebanyak 12 orang. Masih dibutuhkan 11 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah menyampaikan usulan kekurangan jabatan yang ada ke BKPSDM untuk formasi jabatan CPNS/PPPK. Selain itu mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menaruh PTT/pegawai non PNS agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.

penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Adapun serapan Anggaran dari Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD dilihat pada tabel 15 diatas jumlah serapan sebesar 75,61%. Sisa dana terbesar ada pada pendalaman tugas DPRD dan sisa dana pengadaan barang dan belanja Modal. Sisa diakibatkan adanya efisiensi belanja.

1.1 Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ada 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja. Realisasi indikator kinerja jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani mencapai 2.574 dokumen (100,23%) dari target 2.568 dokumen, Jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sebesar 11 orang (73,33%) dari target 15 orang, Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sebesar 117 orang (66,86%) dari target 175 orang, jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya terealisasi 32 orang (91,43%) dari target 35 orang serta jumlah tenaga ahli yang disediakan terealisasi 16 orang (320%) dari target 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.568 dokumen	2.574dokumen	100,23%
2.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	15 orang	11 orang	73,33%
3.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	175 orang	117 orang	66,86%
4.	Melaksanakan fasilitasi pemeriksa kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	35 orang	32 orang	91,43%
5.	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5 orang	16 orang	320%

b. Uraian dan analisis Capaian IKU**1. Perbandingan Realisasi dengan Target**

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi kinerja dari target yang ditetapkan diperoleh data sebagai berikut:

- jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani mencapai 2.574 dokumen (100,23%) dari target 2.568 dokumen;
- Jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sebesar 11 orang (73,33%) dari target 15 orang;
- Jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sebesar 117 orang (66,86%) dari target 175 orang;
- jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya terealisasi 32 orang (91,43%) dari target 35 orang; dan
- jumlah tenaga ahli yang disediakan terealisasi 16 orang (320%) dari target 5 orang.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani dari tahun 2019 menurun pada tahun 2020 sebanyak 207 dokumen dan dari tahun 2020 ke 2021 menurun kembali sebanyak 17 dokumen. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 sebanyak 159 dokumen yaitu mencapai 2.574 dokumen.

Realisasi jumlah diklat/bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi sejak tahun 2019 meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021 yang terealisasi 100% dari target. Tahun 2022 tidak mencapai target. Realisasi hanya 11 orang dari target 15 orang atau dengan kata lain terealisasi hanya mencapai 73,33% dari target tahun 2022.

Realisasi jumlah diklat/bimtek anggota DPRD yang difasilitasi sejak tahun 2019 menurun realisasinya sebanyak 210 orang. Realisasi tahun 2021 sebanyak 57 orang,

meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah peningkatan sebanyak 24 orang dari realisasi tahun 2020 sebanyak 33 orang. Tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi yaitu mencapai 117 orang/kali dengan persentase capaian target 66,86 %, meningkat 60 orang atau 34,29% dibandingkan tahun 2021.

Jumlah anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya pada tahun 2019 sebanyak 33 orang dan pada tahun 2020 tidak terealisasi sama sekali. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terealisasi sebanyak 32 orang dengan serapan 91,43% dari target.

Jumlah tenaga ahli DPRD yang tersedia pada tahun 2019 tersedia 3 orang dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 4 orang. Pada tahun 2021 dan 2022 terealisasi 16 tenaga ahli dengan persentase capaian 320%.

Tabel 19. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.639 dokumen	2432 dokumen	2415 dokumen	2568 dokumen	2574 dokumen	100,23%
2.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah diklat/Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi	11 orang	12 orang	15 orang	15 orang	11 orang	73,33%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
3.	Melaksanakan fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM anggota DPRD	Jumlah diklat/Bimtek Anggota DPRD yang difasilitasi	210 kali	33 kali	57 orang	175 orang	117 orang	66,86%
4.	Melaksanakan fasilitasi pemeriksaan kesehatan anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya	33 orang	0 orang	32 orang	35 orang	32 orang	91,43%
5.	Melaksanakan fasilitasi pemenuhan tenaga ahli yang disediakan	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	3 orang	4 orang	16 orang	5 orang	16 orang	320%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani tahun 2022 merupakan data yang bersumber dari aktivitas organisasi yang bersumber dari kegiatan surat menyurat baik masuk maupun keluar serta dokumen kepegawain yang dikelola. Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan administrasi dan kepegawaian Sekretariat DPRD di dukung dengan jumlah pegawai 87 orang yaitu terdiri dari 35 orang ASN, 36 orang PTT, 8 orang Tenaga Ahli AKD dan 8 orang Tenaga Ahli Fraksi. Adapun nama jabatan, eselon dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Nama Jabatan, Eselon, Status dan Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Sekretaris	II b	0	0	0
2	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	III a	1	0	1
	Kepala Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	10	0	10
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	21	21
3	Kepala Bagian Keuangan	III a	1	0	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	IV a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	6	0	6
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	6	6
4	Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	III a	1	0	1
	- <i>Jabatan Fungsional Umum (JFU)</i>	-	6	0	6
	- <i>Pegawai Tidak Tetap (PTT)</i>	-	0	9	9
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	8	0	8
6	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	-	0	8	8
7	Tenaga Ahli Fraksi	-	0	8	8
JUMLAH			35	52	87

Pegawai ASN lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 sebanyak 32 orang . Pegawai yang memiliki pangkat golongan 4 sebanyak 4 orang, golongan 3 sebanyak 18 orang, golongan 2 sebanyak 12 orang dan golongan 1 sebanyak 1 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pangkat, Golongan dan Ruang pada Tahun 2022

No.	Jenis Pangkat	Golongan / Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	IV/e	0
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0
3	Pembina Utama Muda	IV/c	2
4	Pembina Tk. I	IV/b	1
5	Pembina	IV/a	1
6	Penata Tk.I	III/d	2
7	Penata	III/c	5
8	Penata Muda Tk.I	III/b	4
9	Penata Muda	III/a	6
10	Pengatur Tk.I	II/d	9
11	Pengatur	II/c	3
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0
13	Pengatur Muda Tk.I	II/a	1
14	Juru Tk I	I/d	1
15	Juru Tk I	I/c	0
16	Juru Muda Tk.I	I/b	0
17	Juru Muda	I/a	0
JUMLAH			35

Pendidikan terakhir pegawai sekretariat DPRD tahun 2022 dari 87 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sekolah dasar sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 1 orang, SLTA/SMK sebanyak 29 orang, D3 sebanyak 8 orang, D4 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 35 orang dan master/pasca sarjana sebanyak 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Tahun 2022

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2	-	2
2	SLTP	-	1	1
3	SLTA / SMK	12	17	29
4	D.1	-	-	0
5	D.2	-	-	0
6	D.3	2	6	8
7	D.4	2	-	2
8	Sarjana (S.1)	13	22	35
9	Master / Pasca Sarjana	4	6	10
10	Dokter / S3	-	-	0
JUMLAH		35	52	87

Dengan kondisi pegawai sebagaimana dijelaskan diatas, sangat diharapkan pengelolaan administrasi dan kepegawaian kedepannya bisa lebih baik dan dapat lebih ditingkatkan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia.

Realisasi Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi tahun 2022 adalah merupakan kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana terlaksana sebanyak 117 orang/kali. Capaian kinerja belum optimal. Kedepan akan lebih ditingkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka peningkatan kemampuan teknis DPRD Kabupaten Tanah Laut, karena kegiatan ini sangat penting terutama dalam rangka untuk menyikapi terhadap ketentuan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Realisasi Diklat / Bimtek sekretariat DPRD yang difasilitasi tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan aparatur ASN lingkup sekretariat tercapai 73,33% yaitu 11 orang dari target. Untuk kedepannya semoga bisa lebih ditingkatkan lagi mengingat jumlah ASN yang melaksanakan diklat/bimteks baru mencapai 31,43% dari jumlah ASN sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Persentase pemenuhan tenaga ahli DPRD terealisasi 16 orang dari target 5 orang dengan persentase capaian 320%. Realisasi tenaga ahli yang disediakan tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan PP 18 tahun 2017. Adapun 16 orang tenaga ahli tersebut terdiri dari :

- 8 orang tenaga ahli AKD dengan rincian : 3 orang untuk Komisi I, Komisi II dan komisi III, Badan Anggaran sebanyak 1 orang dan Bapemperda 1 orang
- 8 orang tenaga ahli fraksi dengan rincian 1 orang per fraksi yaitu fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, PKB dan Demokrat.

Realisasi Anggota DPRD yang difasilitasi pemeriksaan kesehatannya pada tahun 2022 sebanyak 32 orang dari 35 anggota DPRD. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2022 di lantai 3 ruang MCU RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian Tatausaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD tidak mengampu program/kegiatan.

6. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada sub bagian tatausaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD sebanyak 6 orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 4 orang. Masih dibutuhkan 2 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan analisis tata laksana dan pengelola teknologi informatika. Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT /tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian tidak mengampu program kegiatan sehingga analisis efisiensi tidak dilaksanakan

2. Kepala Bagian Keuangan

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis di bagian keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Sekretariat DPRD. Target kinerja yang ditetapkan adalah katagori BB (sangat baik) . Realisasi indikator kinerja tahun 2022 memperoleh nilai SAKIP sebesar 79,5 dengan katagori BB (sangat baik) dengan demikian capaian target terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (sangat Baik)	BB (sangat Baik) 79,5	100

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2022 mencapai 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Nilai SAKIP sekretariat DPRD Tahun 2019 sampai dengan 2021 meningkat dari katagori B menjadi BB, walaupun tahun 2020 ke 2021 masih dikatagori BB namun dari segi nilai ada peningkatan sebesar 1,81 point. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai sebanyak 1,61 point dari tahun 2021 menjadi 79,5. Nilai juga masih dalam katagori

BB. Secara keseluruhan capaian target telah tercapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B 67,54	BB 76,08	BB 77,89	BB	BB 79,5	100

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan terutama di komponen perencanaan kinerja (0,11 point), pelaporan kinerja (0,53 point) dan evaluasi internal (1,29 point). Sedangkan penurunan nilai evaluasi ada pada komponen pencapaian kinerja (0,12 point). Untuk komponen pengukuran kinerja nilai evaluasi tetap tidak ada peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Nilai Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	TAHUN PENILAIAN		
		2020	2021	2022
1	Perencanaan kinerja	26,81	26,92	24
2	Pengukuran kinerja	19,38	19,38	24
3	Pelaporan kinerja	10,07	10,6	11,5
4	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal	5,26	6,55	20
5	Pencapaian kinerja	14,56	14,44	-
JUMLAH		76,08	77,89	79,5

Predikat BB dengan nilai 79,5 maka Sekretariat DPRD dengan interpretasi SKPD yang akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Walaupun demikian ke 4 (empat) komponen penilaian masih dapat ditingkatkan dengan berusaha maksimal dalam meningkatkan peran serta dan perbaikan secara terus menerus agar tercapai predikat A (memuaskan) atau AA (sangat memuaskan).

Upaya yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan Nilai implementasi SAKIP Sekretariat DPRD ke depannya antara lain :

1. **Perencanaan Kinerja** ; meningkatkan kualitas perencanaan dengan tetap melakukan perbaikan/ penyempurnaan dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik; selain itu juga mempertahankan kegiatan monitoring rencana aksi secara berkala dari mulai eselon 2 sampai ke unit di bawahnya.
3. **Pengukuran Kinerja** ; melakukan reviu berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja dengan melibatkan stake holder terkait
4. **Pelaporan Kinerja**; Dalam dokumen laporan kinerja akan menyajikan/menginformasikan:

- perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten/ Provinsi/ nasional;
 - menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja
4. **Evaluasi Kinerja:** Hasil evaluasi terhadap kinerja akan dilaksanakan atau dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja SKPD. Adapun tindak lanjut ke depannya sebagai berikut:
- Hasil evaluasi AKIP internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - Hasil dari evaluasi AKIP internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
 - Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan di dokumentasikan secara lengkap sehingga pemanfaatannya dapat dimaksimalkan;
 - Rekomendasi hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh APIP segera di tindaklanjuti.

Realisasi dan target pencapaian indikator Kinerja kepala Bagian Keuangan dan indikator kinerja khusus pendukungnya pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Perhitungan persentase realisasi capaian sub indikator kinerja dan persentase realisasi capaian indikator kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian sub IKK} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun ke-n}}{\text{Jumlah target Tahun Ke-n}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian IKK} = \frac{\text{Jumlah Realisasi sub IKK tahun ke-n}}{\text{Jumlah Target sub IKK thn ke-n}} \times 100$$

Tabel 26. Realisasi dan Target Capaian IKU Kepala Bagian Keuangan Perindikator Kinerja Khusus Tahun 2019-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI						Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
		2019	2020	2021	2022				
					Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B (baik) 67,54	BB (sangat Baik) 76,08	BB (sangat Baik) 77,89	BB (sangat Baik)	BB (sangat Baik) 79,5	100%	BB (sangat Baik)	100%
	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD (dokumen)	4	6	6	6	7	116,67	6	116,67
	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan (dokumen)	1930	2093	2357	1930	2323	120%	1930	120,36
	Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan (dokumen)		85	91	60	155	258%	60	258,33
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan (laporan)	7	7	7	7	7	100%	7	100,00
	Jumlah Dokumen Akutansi yang dilaksanakan (dokumen)	1930	2093	2357	1930	2323	120,36	1930	120,36

4. Analisis Program Penunjang

Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mengampu 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan jumlah Pagu Rp. 29.939.813.035,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 27.272.611.448,- (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua juta Enam Ratus Ssebelas Ribu Empat ratus Empat Puluh Delapan Rupiah.-*) atau dengan kata lain 91,09 % dari pagu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 27. Realisasi Program Kegiatan Penunjang Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.939.813.035	27.272.611.448	91,09
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	17.586.898	13.133.100	74,68
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.053.614.428	4.466.601.769	88,38
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	39.987.385	24.898.300	62,27
<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>			
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	24.756.352.220	22.740.993.779	91,86
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.272.104	26.984.500	37,34
JUMLAH	29.939.813.035	27.272.611.448	91,09

5. Analisis Terhadap Penggunaan Sumberdaya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 17 orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 10 orang. Masih dibutuhkan 7 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan Pengelola Bahan Perencanaan 1 orang, Verifikator 2 orang, pengelola perjalanan dinas 1 orang, pengelola keuangan 1 orang,

pengelola laporan keuangan¹ orang serta pengelola program dan laporan 1 orang. Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT /tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Serapan keuangan berdasarkan tabel 31 sebesar 91,09% dari pagu anggaran yang diampu bagian keuangan menggambarkan kemampuan Bagian Keuangan dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana serapan anggaran merupakan akumulasi dari serapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing PPTK dilingkup bagian keuangan. Berdasarkan realisasi keuangan 91,09% dan realisasi fisik sebesar 99,85% maka jumlah efisiensi anggaran sebesar 8,76%.

Sisa dana terbesar ada pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD serta Sisa dana yang diakibatkan adanya efisiensi belanja pada sub kegiatan lainnya.

2.1 Kasubbag Perencanaan dan Anggaran

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD. Target indikator kinerja tahun 2022 sebanyak 6 dokumen dengan realisasi sebanyak 7 dokumen dengan kata lain capaian kinerja mencapai 116,7%. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

- 1). Dokumen Renja Murni 2023;
- 2). Renja Perubahan 2022;
- 3). DPA murni 2022 (termasuk RKA);
- 4). DPA perubahan 2022 (termasuk RKA-P);
- 5). Penetapan Kinerja (PK) murni;
- 6). Penetapan Kinerja Perubahan; dan
- 7). Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) 2022

Tabel 28. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target Akhir renstra (2023)	Capaian target 2022 terhadap target akhir renstra (%)
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6 dokumen	7 dokumen	116,7	6 dokumen	116,7

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2022 mencapai 116,7%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian indikator kinerja sub bagian perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD tahun dibandingkan pada tahun 2019, terjadi peningkatan pada tahun 2020. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sama-sama mencapai target kinerja dengan persentase capaian 100% dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 mencapai 116.7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian %
1.	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	4 dok	6 dok	6 dok	6 dok	7 dok	116,7

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi Target Indikator Kinerja mencapai 100% pada tahun 2022 meliputi 1). dokumen renja murni, 2). renja perubahan, 3). DPA murni (termasuk RKA), 4). DPA perubahan (termasuk RKA-P), 5). penetapan kinerja (PK) murni 6). penetapan kinerja perubahan dan 7). Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) 2022.

Semua dokumen tersebut adalah dokumen yang harus tersedia dan tersusun dengan baik. Dokumen perencanaan dan penganggaran berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

4. Analisis Program Penunjang

Sub bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD mengampu 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun Jumlah Pagu kegiatan sebesar Rp. 72.272.104.- (*Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Rupiah.-*) dengan realisasi Rp. 26.984.500.- (*Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.-*) dengan kata lain persentase capaian keuangan 37,34%. Walaupun capaian keuangan sebesar 37,34% tetapi capaian fisik mencapai 100%.

Tabel 30. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
		Rp.	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.272.104	26.984.500	37,34
JUMLAH	72.272.104	26.984.500	37,34

5. Analisis Terhadap Penggunaan Sumberdaya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD sebanyak 4 orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 3 orang. Masih dibutuhkan 1 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan Pengelola Bahan Perencanaan sebanyak 1 orang. Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT /tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Serapan keuangan berdasarkan tabel 30 sebesar 37,34% dari pagu anggaran yang diampu sub bagian Perencanaan dan anggaran menggambarkan kemampuan dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah direncanakan. Mengingat capaian output kegiatan terpenuhi 116.7% sekalipun serapan keuangan hanya mencapai 37,34%, perlu dilakukan penghitungan ulang dan cermat dalam mengalokasikan dana pada sub kegiatan ini di tahun anggaran 2023 mengingat banyaknya dana yang tidak terserap.



Gambar 2. Rapat Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Badan Anggaran dalam Rangka Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 9 Agustus 2022

3. Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD

a. Target dan Capaian IKU

Sasaran strategis di bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD dengan 4 indikator kinerja dengan keseluruhan target indikator adalah 100%. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 untuk indikator persentase rapat yang difasilitasi 106,67 % dari target 100%, persentase fasilitas pembahasan rancangan Perda 66,67% dari target 100%, persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi 66,67% dari target 100% dan persentase kegiatan reses yang dilaksanakan 100% dari target 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya fasilitas dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1. Persentase rapat yang difasilitasi	100%	106,67	106,67
	2. Persentase fasilitas pembahasan rancangan Perda	100%	66,67	66,67
	3. Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	66,67	66,67
	4. Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100,00	100,00

b. Uraian dan analisis Capaian IKU

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan tabel tersebut diatas, perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja tahun 2022 adalah 1 (satu) indikator kinerja mencapai sesuai target 100% dan 1 (satu) indikator yang melampaui target yaitu indikator kinerja persentase rapat yang difasilitasi (106,67%) dan 2 (dua) indikator persentase fasilitas pembahasan rancangan perda dan Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi yang belum mencapai target yaitu sebesar 66,67%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi dibandingkan tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar dari 97% menjadi 143,53% pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 sebesar 106,67%.

Realisasi persentase pembahasan rancangan Perda mengalami penurunan realisasi dari 2019 sebanyak 127% menjadi 100% pada tahun 2020 dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 71,05%. Kondisi ini menurun lagi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 66,67%.

Realisasi persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 200% dari target 100%. Walaupun realisasi tahun 2021 menurun dibandingkan realisasi tahun 2020, tetapi capaian realisasi tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, capaian realisasi menurun lagi dan hanya mencapai 66,67%.

Realisasi persentase kegiatan reses yang dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sesuai dengan target kinerja yaitu mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase rapat yang difasilitasi	97%	97,25%	131,76%	100%	106,67%	131,76%
		Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	127%	100%	71,05%	100%	66,67%	71,05%
		Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	200%	100%	100%	66,67%	100%
		Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi capaian kinerja persentase rapat yang difasilitasi mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2021 sebesar 143,53% menjadi 106,67 % pada tahun 2022. Penurunan sebesar 36,86% dari target. Walaupun menurun dibandingkan tahun 2021 secara umum target terpenuhi dan terlampaui.



Gambar 3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum RT dan RW Kelurahan se-Kecamatan Pelaihari pada tanggal 21 Maret 2022

Realisasi persentase pembahasan rancangan Perda mengalami penurunan realisasi dari 100% pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 71,05% dan menurun lagi pada tahun 2022 menjadi 66,67%. Realisasi persentase pembahasan Raperda terdiri dari persentase capaian jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi dan persentase capaian jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu. Penurunan capaian sebesar 4,38% hal ini dikarenakan capaian jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi hanya mencapai 9 perda dari 15 raperda yang ditargetkan.

Ada beberapa Raperda berdasarkan pertimbangan Bapemperda menunda pembahasan hingga pengusul (SKPD) selesai melakukan perbaikan dan penyempurnaan naskah Akademik dan draf Raperdanya.



Gambar 4. Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propomperda) Kabupaten Tanah Laut, 16 November 2022

Realisasi persentase kegiatan reses yang dilaksanakan tahun 2022 sesuai dengan target kinerja yaitu mencapai 100%. Pelaksanaan reses anggota DPRD sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Februari, Juli dan Desember.

Realisasi persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi tahun 2022 menurun dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 33,33%. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja alat kelengkapan DPRD (komisi I, Komisi II dan Komisi III) dalam hal ini berkaitan dengan stake holder dan instansi/SKPD terkait.



Gambar 5. Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 17 Mei 2022

Untuk lebih jelasnya, perbandingan realisasi dan target capaian IKU Kabag Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD tahun 2019 sd. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 33. Realisasi Dan Target Capaian IKU Kabag Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2019 sd. 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
			2019	2020	2021	2022		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase rapat yang difasilitasi	97%	97,25%	131,76%	100%	106,67%	106,67%
		Jumlah Rapat yang difasilitasi	208	248	366	255	272	106,67
		Jumlah hearing/dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	4	4	21	4	4	100,00
		Persentase fasilitasi pembahasan rancangan Perda	127%	100%	71,05%	100%	66,67%	66,67%
		Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda yang difasilitasi	14	11	8	15	9	60,00
		Jumlah fasilitasi pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	3	3	3	3	3	100,00
		Persentase kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100%	200%	100%	100%	66,67%	66,67%
		jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	4	12	6	6	4	66,67
		Persentase kegiatan Reses yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan	2	3	3	3	3	100,00

4. Analisis Program Penunjang

Bagian fasilitasi tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mengampu 2 program 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan Jumlah pagu kegiatan Rp. 23.416.265.834.- (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah.-*). Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.264.288.651.- (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah.-*)

dengan persentase realisasi keuangan 65,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Realisasi Program/Kegiatan Penunjang Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU ANGGARAN
		KEUANGAN	%	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.583.967.109	14.492.291.651	64,17	8.091.675.458
<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>				
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	14.048.620.198	9.343.527.565	66,51	4.705.092.633
<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>				
<i>Pembahasan APBD</i>	94.394.280	38.438.200	40,72	55.956.080
<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>				
<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	85.760.449	3.567.000	4,16	82.193.449
<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	6.997.821.500	4.251.080.386	60,75	2.746.741.114
<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	9.796.309	2.645.800	27,01	7.150.509
<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	205.878.503	155.566.200	75,56	50.312.303
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>				
<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	67.398.169	14.827.700	22,00	52.570.469
<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>				
<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	1.074.297.701	682.638.800	63,54	391.658.901
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	832.298.725	771.997.000	92,75	60.301.725
<i>Layanan Administrasi DPRD</i>				
<i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	33.554.289	9.423.000	28,08	24.131.289
<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	798.744.436	762.574.000	95,47	36.170.436
JUMLAH	23.416.265.834	15.264.288.651	65,19	8.151.977.183

5. Analisis Terhadap Penggunaan Sumberdaya

Kondisi ideal jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab pada Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD sebanyak 14(empat belas) orang. Kondisi pada tahun 2022 jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan sebanyak 11 orang. Masih dibutuhkan 3 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan Analis Hukum 1 (satu) orang, pengadministrasi rapat 1 (satu) orang dan Notulis rapat 1 (satu) orang.

Untuk mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan menempatkan PTT/tenaga teknis yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keperluan.

Serapan keuangan berdasarkan tabel 45 sebesar 65,19% dari pagu anggaran yang diampu Bagian Fasilitasi Tugas dan fungsi DPRD menggambarkan kemampuan dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Tabel 44, rata-rata persentase keseluruhan realisasi indikator Kinerja Kepala Bagian Umum fasilitasi tugas dan fungsi DPRD sebesar 84,83% dengan realisasi keuangan sebesar 65,19% maka terjadi efisiensi anggaran 19,64%.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni tahun 2022 sebesar Rp.61.202.812.673.-. Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui DPA-P 2022 menjadi Rp. 63.394.799.817,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.531.416,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,03 % dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 13.293.268.401.- (20,97%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	URAIAN	PAGU MURNI 2022	PAGU PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	
				Rp.	%
5	BELANJA DAERAH	61.202.812.673	63.394.799.817	50.101.531.416	79,03
5.1	BELANJA OPERASI	60.199.733.003	62.045.658.275	49.007.708.374	78,99
5.1.01	Belanja Pegawai	29.589.966.648	29.809.966.648	27.207.565.548	91,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.609.766.355	32.235.691.627	21.800.142.826	67,63
5.2	BELANJA MODAL	1.003.079.670	1.349.141.542	1.093.823.042	81,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.316.723	684.722.903	581.777.042	84,97
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	589.762.947	664.418.639	512.046.000	77,07

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebesar Rp 62.045.658.275 terealisasi belanja sebesar Rp. 49.007.708.374 (78,99%). Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.349.141.542 dengan realisasi sebesar Rp. 1.093.823.042 (81,08%).

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dari 35 sub kegiatan yang ada, 6 sub kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 50%.

Untuk lebih jelasnya realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan pada pos belanja langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 36. Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja berdasarkan Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK	FISIK TTB (%)	KEUANGAN	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	26.231.786.316	16.694.263.024		33,56	63,64	9.537.523.292
Fasilitasi Tugas DPRD						
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	9.343.527.565	84,00	19,28	66,51	4.705.092.633
Pembahasan Kebijakan Anggaran						
Pembahasan APBD	94.394.280	38.438.200	43,07	0,07	40,72	55.956.080
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	3.567.000	59,33	0,08	4,16	82.193.449
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	4.251.080.386	68,00	7,77	60,75	2.746.741.114
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	2.645.800	65,00	0,01	27,01	7.150.509
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	155.566.200	98,00	0,33	75,56	50.312.303
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	14.827.700	75,00	0,08	22,00	52.570.469
Peningkatan Kapasitas DPRD						
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	336.000.000	90,00	0,60	82,86	69.495.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	466.744.776	78,00	0,99	59,97	311.516.939
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	1.126.384.097	75,00	2,65	52,04	1.038.040.903
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	272.842.500	95,00	0,47	91,06	26.794.992
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	682.638.800	70,00	1,23	63,54	391.658.901

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK	FISIK TTB (%)	KEUANGAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	37.163.013.501	33.407.268.392		59,77	89,89	3.755.745.109
Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	323.500.000	101.948.786	55,00	0,29	31,51	221.551.214
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	13.133.100	95,00	0,03	74,68	4.453.798
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	4.466.601.769	100,00	8,26	88,38	587.012.659
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	24.898.300	98,33	0,06	62,27	15.089.085
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393	17.328.650	96,33	0,05	58,56	12.262.743
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	2.075.210.765	98,00	3,43	96,90	66.286.485
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	10.308.332	99,00	0,02	91,18	996.607
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	14.301.710	100,00	0,04	58,17	10.285.035
Layanan Administrasi DPRD						
Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	9.423.000	77,50	0,04	28,08	24.131.289
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	762.574.000	100,00	1,31	95,47	36.170.436
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	57.957.000	100,00	0,11	82,80	12.043.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	325.775.900	100,00	0,66	80,40	79.417.350
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	22.740.963.779	100,00	40,45	91,86	2.015.388.441
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan/Rehabili- tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	130.180.000	80,00	0,26	64,29	72.320.720

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN	PROSENTASE			SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK	FISIK TTB (%)	KEUANGAN	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	234.833.680	166.848.226	80,00	0,31	71,05	67.985.454
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	215.925.851	153.256.300	78,00	0,28	70,98	62.669.551
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	66.670.000	33.519.800	55,00	0,06	50,28	33.150.200
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	190.939.534	137.780.000	80,00	0,25	72,16	53.159.534
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	1.172.858.967	945.727.522	90,00	1,72	80,63	227.131.445
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	16.241.100	14.034.157	100,00	0,03	86,41	2.206.943
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	311.290.912	258.810.236	95,00	0,48	83,14	52.480.676
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	973.967.400	919.702.560	99,57	1,58	94,43	54.264.840
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	72.272.104	26.984.500	41,00	0,05	37,34	45.287.604
JUMLAH	63.394.799.817	50.101.531.416		93,33	79,03	13.293.268.401

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 27.207.565.548.- dengan rincian Belanja gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. 4.466.601.769.- dan belanja gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 22.740.963.779.- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 37. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	4.466.601.769	587.012.659	88,38
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.756.352.220	22.740.963.779	2.015.388.441	91,86
Jumlah	29.809.966.648	27.207.565.548	2.602.401.100	91,27

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 21.800.142.826.- atau 67,63 % dari pagu anggaran tahun 2022 Rp. 32.235.691.627. dengan sisa anggaran Rp. 10.435.548.801 atau 32,37 % dari pagu. Adapun Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2022 secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 38. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
Belanja Barang dan Jasa	32.235.691.627	21.800.142.826	67,63	10.435.548.801
Belanja Barang	3.314.022.809	2.390.032.405	72,12	923.990.404
Belanja Barang Pakai Habis	3.314.022.809	2.390.032.405	72,12	923.990.404
Belanja Jasa	4.648.995.672	3.330.246.296	71,63	1.318.749.376
Belanja Jasa Kantor	2.813.310.912	2.178.946.736	77,45	634.364.176
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.567.400	4.502.560	59,50	3.064.840
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	116.516.700	54.478.000	46,76	62.038.700
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	306.600.660	172.280.000	56,19	134.320.660
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	195.000.000	148.539.000	76,17	46.461.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.210.000.000	771.500.000	63,76	438.500.000
Belanja Pemeliharaan	530.135.710	255.278.326	48,15	274.857.384
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.140.000	125.098.326	43,42	163.041.674
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241.995.710	130.180.000	53,79	111.815.710
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	23.742.537.436	15.824.585.799	66,65	7.917.951.637
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.742.537.436	15.824.585.799	66,65	7.917.951.637

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 581.777.042.- atau 84,97 % dari pagu Rp. 684.722.903.-. dengan jenis belanja pengadaan Belanja Modal Alat Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	684.722.903	581.777.042	84,97	102.945.861
Belanja Modal Alat Besar	8.982.050	-	-	8.982.050
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	319.942.124	251.854.703	78,72	68.087.421
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.430.000	-	-	14.430.000
Belanja Modal Komputer	302.518.729	257.172.339	85,01	45.346.390
Belanja Modal Peralatan Olahraga	38.850.000	36.100.000	92,92	2.750.000

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 512.046.000.- atau 77,07 % dari pagu Rp. 664.418.639. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA ANGGARAN
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	664.418.639	512.046.000	77,07	152.372.639
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	664.418.639	512.046.000	77,07	152.372.639
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	664.418.639	512.046.000	77,07	152.372.639

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD memiliki pagu Anggaran sebesar Rp. 26.231.786.316.- dengan realisasi belanja sebesar Rp.16.694.263.024.- Persentase capaian keuangan sebesar 63,64% dan realisasi fisik tertimbang sebesar 33,56% dari target indikator kinerja keseluruhan Tahun 2022.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 37.163.013.501.- dengan realisasi belanja Rp. 33.407.268.392.-.Persentase Capaian Keuangan sebesar 89,89% dan realisais fisik tertimbang sebesar 59,77% dari target indikator kinerja keseluruhan Tahun 2022.

Secara keseluruhan Sekretariat DPRD memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 63.394.799.817.- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.531.416.-. atau dengan kata lain realisasi keuangan sebesar 79,03%. Persentase capaian fisik tertimbang sebesar 93,33% dari target indikator kinerja keseluruhan Tahun 2022.

Tabel 41. Program, Pagu dan Realisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PROSENTASE		SISA PAGU ANGGARAN
			FISIK TBB%	KEUANGAN	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	26.231.786.316	16.694.263.024	33,563	63,64	9.537.523.292
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.163.013.501	33.407.268.392	59,771	89,89	3.755.745.109
JUMLAH	63.394.799.817	50.101.531.416	93,33	79,03	13.293.268.401

3. Perbandingan program dan kegiatan tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2020 terdapat 5 program dan 18 kegiatan dan pada tahun 2021 menjadi 2 program, 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Pada tahun 2022 menjadi 2 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Pagu tahun 2021 sebesar Rp. 69.248.368.264.- dengan realisasi belanja Rp.45.174.057.250.- atau dengan kata lain capaian realisasi keuangan sebesar 65,23%. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pagu menurun dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 63.394.799.817.- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 50.101.531.416.- meningkat 4.927.474.166 dibandingkan tahun 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas ; pagu pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pagu dan realisasi tahun 2022 namun realisasi belanja mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2022

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		b. -
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		c. -
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		d. -
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		e. -
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		f. -
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		g. -
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a. <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		b. -
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		c. <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>
	d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		d. <i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		e. -
	f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		f. -

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		g. -
	h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		h. -
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		a. -
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a. Pengadaan Mebel		a. -
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		b. <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		a. -
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		b. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		c. <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		d. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>		<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>
	a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>		<i>Layanan Administrasi DPRD</i>
	a. Fasilitas Fraksi DPRD		a. Fasilitas Fraksi DPRD
	b. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		b. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>
	a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Pembahasan Kebijakan Anggaran
	a. Pembahasan KUA dan PPAS		a. -
	b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		b. -
	c. Pembahasan APBD		c. Pembahasan APBD
	d. Pembahasan APBD Perubahan		d. -
	e. Pembahasan Laporan Semester		e. -
	f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		f. -
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	a. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		a. -
	b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		b. -
	c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		c. -
	d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		d. -
	e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		e. -
	f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		f. -
	g. Pengawasan Penggunaan Anggaran		g. Pengawasan Penggunaan Anggaran
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD
	a. Bimbingan Teknis DPRD		a. Pendalaman Tugas DPRD
	b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan		b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

TAHUN 2021		TAHUN 2022	
Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan	Nama Program	Kegiatan/sub kegiatan
	c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		e.
	f. Penyusunan Program Kerja DPRD		f.
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	a. Kunjungan Kerja dalam Daerah		a. -
	b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	c. Pelaksanaan Reses		c. -
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
	a. Pengawasan Kode Etik DPRD		
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		
	a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		
	b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
	Fasilitasi Tugas DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD
	a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		b. -
Total		Total	
2 Program	18 Kegiatan dan 68 sub kegiatan	2 Program	15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan
Total Anggaran		Total Anggaran	
Rp. 69.248.368.264.-		Rp. 63.394.799.817.-	
Realisasi		Realisasi	
Rp. 45.174.057.250.-		Rp. 50.101.531.416.-	

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sasaran Indikator kinerja utama yakni meningkatnya kinerja layanan DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, dengan indikator utama tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dapat dicapai dengan nilai BAIK (78,26) dari target BAIK (77,10).

Dengan Laporan Kinerja (LKj) diharapkan dapat memperjelas atau memberi gambaran sampai sejauh mana program yang tertuang dalam Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan ini dilaksanakan untuk evaluasi kegiatan dan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2022 dapat tercapai, namun guna lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana;
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil

yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten;

5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai;
6. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada indikator indeks kepuasan;
7. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi untuk menciptakan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat DPRD dan pembahasan raperda.
8. Menyediakan tenaga ahli DPRD, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama tenaga ahli Fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD, sehingga upaya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dapat tercapai.
9. Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta sumber daya manusia Sekretariat DPRD, melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi terhadap bidang tugas baik DPRD maupun Sekretariat DPRD. Misalnya melalui kegiatan workshop, bimtek , seminar, lokakarya, kunjungan kerja, dll.

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja layanan DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD)	Sekretariat DPRD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPAJALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
Ttd

H. SUKAMTA


ALFRIAL, SH, MH
NP.19750203 199903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DPRD

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelayari
Nomor 36 Pelayari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009 Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAFARIN, S.IP, M.Si
NIP : 19690426 199010 1 001
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelayari, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,

SAFARIN, S.IP, M.Si
NIP. 19690426 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Penanggungjawab : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	Baik (77,10)	IKM

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	63.394.799.817	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.163.013.501	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.272.104	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	APBD-P
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.111.188.711	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	APBD-P
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	APBD-P
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	APBD-P
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.500.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000	APBD-P
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.206.980.327	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	APBD-P
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	APBD-P
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393	APBD-P
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	APBD-P
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.172.858.967	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967	APBD-P
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.499.412	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	APBD-P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	APBD-P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	APBD-P
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.869.785	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	APBD-P
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851	APBD-P

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	APBD-P
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.231.545.470	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	APBD-P
Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	APBD-P
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	APBD-P
Layanan Administrasi DPRD	832.298.725	
Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	APBD-P
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	APBD-P
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.231.786.316	APBD-P
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.299.256.761	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	APBD-P
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	APBD-P
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	APBD-P
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	APBD-P
Pembahasan Kebijakan Anggaran	94.394.280	
Pembahasan APBD	94.394.280	APBD-P
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	67.398.169	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	APBD-P
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.647.819.207	
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	APBD-P
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	APBD-P
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	APBD-P
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	APBD-P
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.074.297.701	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	APBD-P
Fasilitasi Tugas DPRD	14.048.620.198	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI TANAH LAUT,



PIHAK PERTAMA
PLH. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,



SAFARIN, S.IP, M.Si
NIP. 19690426 199010 1 001

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Eselon III



Sekretaris DPRD

- Kabag Umum dan Humas
- Kabag Keuangan
- Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Safarin, S.IP, M.Si
NIP : 19690426 199010 1 001
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut

Safarin, S.IP, M.Si
NIP. 19690426 199010 1 001

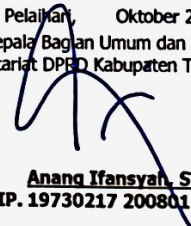
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
 Penanggungjawab : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi	1 Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib	100	%
		2 Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	100	%
		3 Persentasi pemenuhan layanan sarana dan prasarana	100	%
		4 Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	100	%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan DPRD	1 Persentasi kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan keprotokolannya	100	%
		2 Persentasi penyebaran informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD	100	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	10.038.720.948	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.390.901.741	APBD-P
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.500.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	323.500.000	APBD-P
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.206.980.327	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939	APBD-P
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745	APBD-P
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393	APBD-P
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.141.497.250	APBD-P
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.172.858.967	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.858.967	APBD-P
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.499.412	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.290.912	APBD-P
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100	APBD-P
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400	APBD-P
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.869.785	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.833.680	APBD-P
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.925.851	APBD-P
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.670.000	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.939.534	APBD-P
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.500.720	APBD-P
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	475.193.250	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	405.193.250	APBD-P
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000	APBD-P
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.647.819.207	
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.647.819.207	
Pendalaman Tugas DPRD	2.164.425.000	APBD-P
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	778.261.715	APBD-P
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000	APBD-P
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492	APBD-P


 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Tanah Laut,
 Safarin, S.IP, M.Si
 NIP. 19620622198702 2 002

Pelaksanaan, Oktober 2022
 Kepala Bagian Umum dan Humas
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

 Anang Ifansyah, ST
 NIP. 19730217 200801 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, MAP
NIP : 19710224 199702 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Safarin, S.IP, M.Si
NIP : 19690426 199010 1 001
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

H. Achmad Taufik, S.Pd, MAP
NIP. 19710224 199702 1 003

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut, '

Safarin, S.IP, M.Si
NIP. 19690426 199010 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

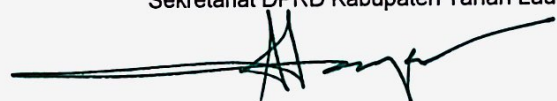
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Kepala Bagian Keuangan
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Sangat Baik

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	29.939.813.035	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.163.013.501	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.272.104	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	APBD-P
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.111.188.711	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	APBD-P
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	APBD-P
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	APBD-P
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.756.352.220	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	APBD-P


 Sekretaris DPRD
 Kabupaten Tanah Laut,
 Safarin, S.IP, M.Si
 NIP. 19620622 198702 2 002

Pelaihari, Oktober 2022
 Kepala Bagian Keuangan
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


 H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
 NIP. 19710224 199702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Kaisar Muslim, SH
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Safarin, S.IP, M.Si
NIP : 19690426 199010 1 001
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

Safarin, S.IP, M.Si
NIP. 19690426 199010 1 001

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan
Fungsi DPRD,


Kaisar Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
: 2022


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	1 Persentasi rapat yang difasilitasi	100	%
		2 Persentasi fasilitasi pembahasan rancangan Perda	100	%
		3 Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	100	%
		4 Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	100	%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	23.416.265.834	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.583.967.109	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.299.256.761	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	APBD-P
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	APBD-P
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309	APBD-P
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	APBD-P
Pembahasan Kebijakan Anggaran	94.394.280	
Pembahasan APBD	94.394.280	APBD-P
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	67.398.169	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	67.398.169	APBD-P
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.074.297.701	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.074.297.701	APBD-P
Fasilitasi Tugas DPRD	14.048.620.198	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	APBD-P
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	832.298.725	
Layanan Administrasi DPRD	832.298.725	
Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	APBD-P
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	APBD-P

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

Safarin, S.IP, M.Si
NIP. 19620622 198702 2 002

Pelaihari, Oktober 2022
Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Kaiser Muslim, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Bagian Umum dan Humas



Kabag Umum dan Humas

- Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
- Analis Kebijakan Muda
- Pranata Hubungan Masyarakat Muda



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Norhayati, S.St.Pi
NIP : 19770502 200903 2 007
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat,


Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Kasubbag Tata Usaha dan
Kepegawaian,


Norhayati, S.St.Pi
NIP. 19770502 200903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Tahun Anggaran

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
: 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	2.568	Dokumen (surat/berkas)
2	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	15	Orang
3	Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi	175	Orang
4	Melaksanakan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaan Kesehatannya	35	Orang
5	Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan tenaga Ahli DPRD	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	5	Orang

Kepala Bagian Umum dan Humas
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Pelaihari, Januari 2022
Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Norhayati, S.St.Pi
NIP. 19770502 200903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Ahmad Yanuar, ST
NIP : 19660102 199303 1 008
Jabatan : Analis Kebijakan Muda selaku sub koordinator rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

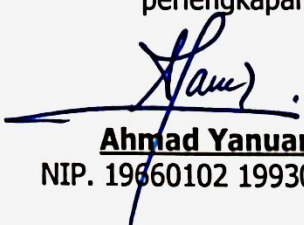
PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat,


Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Analisis Kebijakan Muda selaku sub
koordinator rumah tangga dan
perlengkapan,


Ahmad Yanuar, ST
NIP. 19660102 199303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Analis Kebijakan Muda selaku sub koordinator rumah tangga dan perlengkapan
Tahun Anggaran : 2022

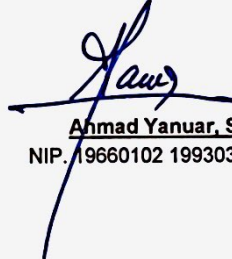
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf	
2	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf	
3	Melakukan advokasi kebijakan	Jumlah laporan advokasi kebijakan	5 laporan	
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN			
1	Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	40	Jenis
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	7	kali

Kepala Bagian Umum dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Laut,
Hubungan Masyarakat


Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Pelaihari, Januari 2022

Analis Kebijakan Muda selaku sub koordinator rumah tangga dan
perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Ahmad Yanuar, ST
NIP. 19660102 199303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nove Noor Salam, SH
NIP : 19861123 201502 1 002
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Muda selaku sub koordinator
Hubungan masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Anang Ifansyah, ST
NIP : 19730217 200801 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Pranata Hubungan Masyarakat Muda
selaku sub koordinator Hubungan
masyarakat dan protokol,

Nove Noor Salam, SH
NIP. 19861123 201502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Pranata Hubungan Masyarakat Muda
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
1	Menyusun Konsep pengembangan model layanan informasi dan	Jumlah Laporan konsep model pelayanan informasi kehumasan	4 laporan	
2	Mengikuti Rapat Pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Kehumasan	Mengikuti Rapat Pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Kehumasan	24 laporan	
3	Mengevaluasi Program pelayanan informasi dan kehumasan	Jumlah Laporan evaluasi pelayanan Informasi kehumasan yang terpublikasikan	12 laporan	
4	Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk pidato	Jumlah Bahan naskah pidato yang terlayani	45 Naskah	
5	Mengikuti Kunjungan Kerja Atau acara Pimpinan/Anggota DPRD	Jumlah Laporan kunjungan kerja/acara seremonial Pimpinan	24 Laporan	
6	Terlaksananya pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan,	Jumlah Laporan kunjungan kerja/acara seremonial Pimpinan	12 laporan	
		Menyusun petunjuk teknis pelayanan komunikasi dan informasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 dok	
7	Mengelola isu publik	Menyusun rancangan pers release kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	12 laporan	
A	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT, PROTOKOL dan PUBLIKASI			
1	Melaksanakan Penyebarluasan informasi / pemberitaan DPRD	Jumlah pemberitaan DPRD yang diekspose	50	kali
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kehumasan dan keprotokolan	1 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	459	kali
		2 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi	255	kali

Pelaihari, Januari 2022

Kepala Bagian Umum dan
Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Laut,

Pranata Hubungan Masyarakat Muda selaku sub koordinator Hubungan
masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Anang Ifansyah, ST
NIP. 19730217 200801 1 009

Nove Noor Salam, SH
NIP. 1986123 201502 1 002

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Bagian Keuangan



Kabag Keuangan

- Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Zikri Fahma, SE, M.A.P
NIP : 19750401 201001 1 010
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP : 19710224 199702 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP. 19710224 199702 1 003

Kasubbag Perencanaan dan
Anggaran,

Zikri Fahma, SE, M.A.P
NIP. 19750401 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	6	Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DPRD	72.272.104	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.272.104	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.272.104	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104	APBD-P

Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP. 19710224 199702 1 003

Pelaihari, Oktober 2022
Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



Zikri Fahma, SE, M.A.P.
NIP. 19750401 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Bintarti, SE
NIP : 19730415 200701 2 024
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub
koordinators Perbendaharaan dan Verifikasi pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP : 19710224 199702 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP. 19710224 199702 1 003

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Muda selaku sub koordinator
Perbendaharaan dan Verifikasi,

Bintarti, SE
NIP. 19730415 200701 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan
: 2022

Tahun Anggaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
1	Melakukan Pengolahan dan analisis data belanja daerah	Jumlah Laporan	12 laporan	
2	Melakukan Monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan	Jumlah Laporan	12 laporan	
3	Menyediakan informasi keuangan daerah	Jumlah Laporan	1 laporan	
4	Memverifikasi dan menspesifikasikan informasi keuangan daerah	Jumlah Laporan	12 laporan	
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI			
1	Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1.930	Dokumen
		2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	60	Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.053.614.428	APBD-P
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898	APBD-P
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220	APBD-P

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut,



H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP. 19710224 199702 1 003

Pelaihari, Oktober 2022

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanah Laut,



Bintarti, SE
NIP. 19730415 200701 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sri Juana, S.Pi
NIP : 19800118 200501 2 016
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub
Koordinator Akuntansi dan Pelaporan pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP : 19710224 199702 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Keuangan,

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Muda selaku sub Koordinator Akuntansi
dan Pelaporan,

H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP. 19710224 199702 1 003

Sri Juana, S.Pi
NIP. 19800118 200501 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
1	Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemutakhiran data mengenai pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Laporan identifikasi, inventarisasi dan pemutakhiran data	1 laporan	
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1 laporan	
3	Menyusun makalah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah	Jumlah makalah	1 laporan	
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI			
1	Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan	7	Laporan
2	Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan	1.930	dok

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385	APBD-P

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tanah Laut,



H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP
NIP. 19710224 199702 1 003

Pelaihari, Oktober 2022

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda selaku sub Koordinator Akuntansi
dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,



Sri Juana, S.Pi
NIP. 19800118 200501 2 016

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD



Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

- Perisalah Legislatif Muda
- Analisis Kebijakan Muda
- Perisalah Legislatif Muda



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Fahrian Nafarie, SH. MH
NIP : 19810116 201101 1 002
Jabatan : Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasiltasi
Legislasi daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, S.H.
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi
DPRD,

Pelaihari, Oktober 2022
Perisalah Legislatif Muda selaku sub
koordinator fasiltasi Legislasi daerah,

Kaisar Muslim, S.H.
NIP. 19671007 199803 1 004

Fahrian Nafarie, SH. MH
NIP. 19810116 201101 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
: Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi Legislasi daerah

Tahun Anggaran

: 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
1	merencanakan pembuatan validasi risalah	Validasi risalah	15 dokumen	
2	memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat	Validasi risalah	15 dokumen	
3	menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia	Risalah rapat	15 dokumen	
4	merencanakan penyusunan buku himpunan risalah dalam satu pokok pembahasan	Perencanaan himpunan risalah dalam satu pokok pembahasan	15 dokumen	
5	mengelompokkan risalah rapat resmi ke dalam satu pokok bahasan	Dokumen himpunan risalah rapat	15 dokumen	
6	menyusun daftar urutan risalah rapat resmi dari kelompok risalah rapat berdasarkan waktu kegiatan	Dokumen himpunan risalah rapat	15 dokumen	
7	menyusun buku himpunan risalah rapat	himpunan risalah rapat tercetak dalam bentuk buku	15 dokumen	
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Raperda	Jumlah fasilitasi Pembahasan Raperda yang difasilitasi	15	Raperda


PROGRAM DAN KEGIATAN


NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85.760.449	APBD-P
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.997.821.500	APBD-P
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	9.796.309	APBD-P
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi Legislasi daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Kaisar Muslim, S.H
NIP. 19671007 199803 1 004


Fahrian Nafarie, SH. MH
NIP. 19810116 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009

Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gilang Pradana, S.STP
NIP : 19891025 201010 1 001
Jabatan : PPTK Sub Keg. Pembahasan APBD, Pengawasan Penggunaan Anggaran dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, S.H.
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi
DPRD,

Kaisar Muslim, S.H.
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, Oktober 2022

PPTK,

Gilang Pradana, S.STP
NIP. 19891025 201010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
 Penanggungjawab : PPTK Sub Keg. Pembahasan APBD, Pengawasan Penggunaan Anggaran dan
 Tahun Anggaran : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD			
1	Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi	1 Jumlah Hearing / dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama yang difasilitasi	4	kali
		2 Jumlah Kegiatan Reses anggota DPRD yang dilaksanakan	3	kali
2	Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Pembahasan Raperda APBD dan Pertanggung jawaban APBD tepat waktu	3	dokumen
		2 jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi	6	dokumen


PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
		Pembahasan APBD	88.607.213
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Kaisar Muslim, S.H.
 NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, Oktober 2022
 PPTK Sub Keg. Pembahasan APBD, Pengawasan Penggunaan Anggaran
 dan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD,


Gilang Pradana, S.STP
 NIP. 19891025 201010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Nomor 36 Pelaihari 70814 Telp/Fax. (0512) 21009
Email : setdprd.tala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Gilang Pradana, S.STP
NIP : 19891025 201010 1 001
Jabatan : Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi tugas-tugas DPRD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : Kaisar Muslim, S.H.
NIP : 19671007 199803 1 004
Jabatan : Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tersebut dalam dokumen perencanaan anggaran, menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta langkah – langkah evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dalam rangka pencapaian dokumen Perencanaan Anggaran.

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi
DPRD,

Kaisar Muslim, S.H.
NIP. 19671007 199803 1 004

Pelaihari, Oktober 2022
Perisalah Legislatif Muda selaku sub
koordinator fasilitasi tugas-tugas
DPRD,

Gilang Pradana, S.STP
NIP. 19891025 201010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut
Penanggungjawab : Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi tugas-tugas DPRD
Tahun Anggaran : 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	KINERJA UTAMA			
1	Penyusunan risalah rapat dan dokumen kelengkapan risalah rapat	Jumlah dokumen	12 dokumen	
2	Penyusunan himpunan risalah rapat	Jumlah dokumen	3 dokumen	
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD			
1	Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1 Jumlah Rapat yang difasilitasi	255	Rapat
2	Melaksanakan pelayanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Jumlah Pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota yang dilaksanakan	1.401	orang / kali

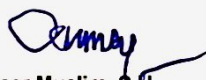
PROGRAM DAN KEGIATAN


NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Administrasi DPRD		
		Fasilitasi Fraksi DPRD	33.554.289	APBD-P
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	798.744.436	APBD-P
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.048.620.198	APBD-P

Pelaihari, Oktober 2022

Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,

Perisalah Legislatif Muda selaku sub koordinator fasilitasi tugas-tugas DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut,


Kaiser Muslim, S.H.
NIP. 19671007 199803 1 004


Gilang Pradana, S.STP
NIP. 19891025 201010 1 001

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
 Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021

SASARAN
Meningkatnya Kinerja Layanan DPRD
INDIKATOR
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap layanan Sekretariat DPRD.

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
Sasaran	Indikator
1) Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan kualitas Administrasi Kepegawaian.	
2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Informasi Publik, kehumasan dan Keprotokolan	
Sasaran	Indikator
1) Persentasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib.	
2) Persentasi Pemenuhan tenaga ahli DPRD	
3) Persentasi pemenuhan layanan sarana dan Prasarana	
4) Persentasi Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
1) Persentasi Kegiatan DPRD yang terlayani kehumasan dan Keprotokolannya	
2) Persentasi penyebarluasan informasi / pemberitaan penyelenggaraan DPRD.	

KEPALA BAGIAN KEUANGAN	
Sasaran	Indikator :
1) Meningkatkan kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan, pelaporan kinerja dan pelaporan Keuangan	
1) Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	

KEPALA BAGIAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
Sasaran	Indikator
1) Meningkatkan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	
Sasaran	Indikator
1) Persentasi Rapat yang difasilitasi	
2) Persentasi Fasilitasi Pembahasan rancangan Perda	
3) Persentasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	
4) Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan	

Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	
Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian	1) Melaksanakan Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan
2) Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD	2) Melaksanakan Penyelenggaraan Kehumasan dan keprotokolan
3) Melaksanakan Fasilitasi Diklat/Bimtek untuk peningkatan kualitas SDM Anggota DPRD	
4) Melaksanakan Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD	
5) Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan tenaga Ahli DPRD	

Kasubag Perencanaan dan Anggaran	
Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan Anggaran SKPD	1) Melaksanakan penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan SKPD
	2) Melaksanakan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Keuangan & Perbendaharaan & Koordinator Akuntansi dan Pelaporan
	1) Melaksanakan Penyusunan Laporan kinerja dan laporan Keuangan SKPD sesuai Ketentuan
	2) Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Akuntansi SKPD

Perisalah Legislatif Muda selaku Sub Koordinator Fasilitasi Tugas - tugas DPRD	
Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1) Melaksanakan Fasilitasi Pembahasan Raperda
2) Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2) Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Perisalah Legislatif Muda selaku Sub Koordinator Kasubag Fasilitasi Legislatif Daerah	
Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1) Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi
2) Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2) Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Analisis Kebijakan Muda selaku Sub Koordinator Fasilitasi penganggaran dan Pengawasan DPRD	
Sasaran	Sasaran
1) Melaksanakan Fasilitasi rapat - rapat DPRD	1) Melaksanakan Fasilitasi hearing dan penyerapan Aspirasi
2) Melaksanakan pelayanan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2) Melaksanakan Fasilitasi layanan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
1 Jumlah dokumen pelayanan Administrasi perkantoran dan kepegawaian yang terlayani	1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	1 Jumlah pemberitaan DPRD yang dikepos	1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	1 Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai ketentuan	1 Jumlah Dokumen Laporan kinerja dan Laporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan
2 Jumlah Diklat / Bimtek Sekretariat DPRD yang difasilitasi	2 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	2 Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		2 Jumlah Dokumen SPMU yang diterbitkan	2 Jumlah Dokumen Akuntansi yang dilaksanakan
3 Jumlah Diklat / Bimtek anggota DPRD yang difasilitasi		3 Jumlah kegiatan Keprotokolan yang difasilitasi			
4 Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi Pemeriksaan Kesehatannya					
5 Jumlah tenaga ahli yang disediakan					



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022
Sekretariat DPRD

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)						
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			37.163.013.501		9.541.767.745		6.015.737.208		8.737.158.079		9.112.675.360		33.407.338.392		89,89%		33.407.338.392		0,00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	72.272.104	33	2.467.500	33	-	56	11.058.400	-	13.458.600	-	26.984.500	0,00%	37,34%	0,00	26.984.500	0,00%	0,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	9	72.272.104	3	2.467.500	2	-	2	11.058.400	2	13.458.600	9	26.984.500	100,00%	37,34%	9,00	26.984.500	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	5.111.188.711	30	945.524.802	55	1.162.406.057	90	1.231.254.919	-	1.165.447.391	-	4.504.633.169	0,00%	88,13%	0,00	4.504.633.169	0,00%	0,00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar Gaji dan Tunjangan Serta Tambahan Penghasilan ASN (Bulan)	0,00	-	0,00	-	12	5.053.614.428	3	945.524.802	6	1.146.702.257	9	1.216.078.919	12	1.158.295.791	12	4.466.601.769	100,00%	88,38%	12,00	4.466.601.769	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	81	17.586.898	33	-	72	6.493.500	109	-	155	6.639.600	155	13.133.100	191,36%	74,68%	155,00	13.133.100	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	347	39.987.385	87	-	107	9.210.300	86	15.176.000	67	512.000	347	24.898.300	100,00%	62,27%	347,00	24.898.300	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	323.500.000	-	84.937.996	45	-	50	7.231.010	-	9.779.780	-	101.948.786	0,00%	31,51%	0,00	101.948.786	0,00%	0,00%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0,00	-	0,00	-	20	323.500.000	9	84.937.996	10	-	11	7.231.010	11	9.779.780	11	101.948.786	55,00%	31,51%	11,00	101.948.786	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	2.206.980.327	17	676.750.983	58	540.281.494	-	373.022.299	-	527.134.681	-	2.117.189.457	0,00%	95,93%	0,00	2.117.189.457	0,00%	0,00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	13	11.304.939	1	1.380.000	2	8.928.332	13	-	13	-	13	10.308.332	100,00%	91,18%	13,00	10.308.332	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	21	24.586.745	-	-	-	-	-	13.469.710	21	832.000	21	14.301.710	100,00%	58,17%	21,00	14.301.710	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	29.591.393	-	-	2	16.174.650	12	1.154.000	12	-	12	17.328.650	100,00%	58,56%	12,00	17.328.650	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	-	0,00	-	75	2.141.497.250	17	675.370.983	139	515.178.512	243	358.398.589	472	526.302.681	472	2.075.250.765	629,33%	96,91%	472,00	2.075.250.765	0,00%	0,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.172.858.967	-	112.285.793	53	125.179.649	-	289.773.000	-	418.489.080	53	945.727.522	52,90%	80,63%	52,90	945.727.522	0,00%	0,00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	17	1.172.858.967	3	112.285.793	9	125.179.649	12	289.773.000	14	418.489.080	14	945.727.522	82,35%	80,63%	14,00	945.727.522	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	1.301.499.412	-	275.821.515	35	304.661.727	75	304.137.942	-	307.925.769	-	1.192.546.953	0,00%	91,63%	0,00	1.192.546.953	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	311.290.912	3	59.564.475	6	59.536.930	9	70.828.002	12	68.880.829	12	258.810.236	100,00%	83,14%	12,00	258.810.236	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	27	16.241.100	-	-	5	6.399.157	20	-	27	7.635.000	27	14.034.157	100,00%	86,41%	27,00	14.034.157	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	432	973.967.400	108	216.257.040	216	238.725.640	324	233.309.940	432	231.409.940	432	919.702.560	100,00%	94,43%	432,00	919.702.560	0,00%	0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13= 12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	-	0,00	-	100	910.869.785	-	20.585.800	24	105.950.750	-	218.964.876	-	276.082.900	-	621.584.326	0,00%	68,24%	0,00	621.584.326	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara") (unit)	0,00	-	0,00	-	4	234.833.680	1	17.676.000	1	21.696.000	2	60.161.326	4	67.314.900	4	166.848.226	100,00%	71,05%	4,00	166.848.226	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara") (unit)	0,00	-	0,00	-	21	215.925.851	-	-	12	74.884.750	18	45.773.550	21	32.598.000	21	153.256.300	100,00%	70,98%	21,00	153.256.300	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara") (unit)	0,00	-	0,00	-	9	66.670.000	-	2.909.800	2	4.465.000	6	-	9	26.145.000	9	33.519.800	100,00%	50,28%	9,00	33.519.800	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara") (unit)	0,00	-	0,00	-	5	190.939.534	-	-	-	-	-	113.030.000	1	24.750.000	1	137.780.000	20,00%	72,16%	1,00	137.780.000	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara") (unit)	0,00	-	0,00	-	6	202.500.720	-	-	1	4.905.000	-	-	5	125.275.000	5	130.180.000	83,33%	64,29%	5,00	130.180.000	0,00%	0,00%
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	0,00	-	0,00	-	100	25.231.545.470	-	7.378.013.356	17	3.661.422.531	81	6.083.945.633	-	6.001.345.159	-	23.124.726.679	0,00%	91,65%	0,00	23.124.726.679	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	0,00	-	0,00	-	12	24.756.352.220	3	7.378.013.356	6	3.661.422.531	9	5.913.044.733	12	5.788.513.159	12	22.740.993.779	100,00%	91,86%	12,00	22.740.993.779	0,00%	0,00%
		Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakiaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya Pakiaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	0,00	-	0,00	-	152	405.193.250	-	-	-	-	-	170.900.900	152	154.875.000	152	325.775.900	100,00%	80,40%	152,00	325.775.900	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check UP DPRD (Orang)	0,00	-	0,00	-	35	70.000.000	-	-	-	-	-	-	31	57.957.000	31	57.957.000	88,57%	82,80%	31,00	57.957.000	0,00%	0,00%
		Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya kegiatan traksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	0,00	-	0,00	-	100	832.298.725	-	45.380.000	15	115.835.000	38	217.770.000	-	393.012.000	-	771.997.000	0,00%	92,75%	0,00	771.997.000	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Peserta Rapat (Orang)	0,00	-	0,00	-	192	33.554.289	-	1.850.000	-	1.440.000	-	2.900.000	2	3.233.000	2	9.423.000	1,04%	28,08%	2,00	9.423.000	0,00%	0,00%
		Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinesi (Kali)	0,00	-	0,00	-	308	798.744.436	45	43.530.000	92	114.395.000	167	214.870.000	270	389.779.000	270	762.574.000	87,66%	95,47%	270,00	762.574.000	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								128,72%	89,89%						
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi						
		SEKRETARIAT DPRD																							
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			-		-		26.231.786.316		2.439.495.634		3.927.389.802		4.637.912.795		5.699.089.793		16.703.888.024		63,68%		16.703.888.024		0,00%
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	0,00	-	0,00	-	100	7.299.256.761	-	224.461.740	7	209.505.896	10	2.011.808.265	-	1.970.203.485	-	4.415.979.386	0,00%	60,50%	0,00	4.415.979.386	0,00%	0,00%
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	85.760.449	-	-	1	-	4	962.000	9	2.605.000	9	3.567.000	47,37%	4,16%	9,00	3.567.000	0,00%	0,00%
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	6.997.821.500	-	224.461.740	1	209.505.896	4	2.010.846.265	9	1.809.386.485	9	4.254.200.386	47,37%	60,79%	9,00	4.254.200.386	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	9.796.309	-	-	1	-	4	-	9	2.645.800	9	2.645.800	47,37%	27,01%	9,00	2.645.800	0,00%	0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	0,00	-	0,00	-	3	205.878.503	-	-	-	-	-	-	3	155.566.200	3	155.566.200	100,00%	75,56%	3,00	155.566.200	0,00%	0,00%
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	0,00	-	0,00	-	100	94.394.280	-	-	-	-	43	14.325.400	-	24.112.800	-	38.438.200	0,00%	40,72%	0,00	38.438.200	0,00%	0,00%
		Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	0,00	-	0,00	-	4	94.394.280	-	-	-	-	-	14.325.400	4	24.112.800	4	38.438.200	100,00%	40,72%	4,00	38.438.200	0,00%	0,00%
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	0,00	-	0,00	-	100	67.398.169	-	-	14	11.911.700	14	2.916.000	-	-	-	14.827.700	0,00%	22,00%	0,00	14.827.700	0,00%	0,00%
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tersedianya bahan untuk pengawasan Anggaran (Eksemplar)	0,00	-	0,00	-	7	67.398.169	-	-	1	11.911.700	2	2.916.000	-	-	-	14.827.700	0,00%	22,00%	0,00	14.827.700	0,00%	0,00%
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Tenukur yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	0,00	-	0,00	-	100	3.647.819.207	-	297.886.076	45	647.644.300	-	465.886.697	-	796.554.300	-	2.207.971.373	0,00%	60,53%	0,00	2.207.971.373	0,00%	0,00%
		Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek DPRD (Kali)	0,00	-	0,00	-	5	2.164.425.000	-	128.533.800	1	403.395.800	6	186.910.947	10	413.543.550	10	1.132.384.097	200,00%	52,32%	10,00	1.132.384.097	0,00%	0,00%
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	0,00	-	0,00	-	340	778.261.715	87	18.152.276	186	89.006.000	345	127.775.750	417	231.810.750	417	466.744.776	122,65%	59,97%	417,00	466.744.776	0,00%	0,00%
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	0,00	-	0,00	-	96	405.495.000	24	84.000.000	48	84.000.000	72	84.000.000	96	84.000.000	96	336.000.000	100,00%	82,86%	96,00	336.000.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD Terpenuhinya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Orang)	0,00	-	0,00	-	96	299.637.492	24	67.200.000	48	71.242.500	72	67.200.000	96	67.200.000	96	272.842.500	100,00%	91,06%	96,00	272.842.500	0,00%	0,00%
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentasi pemenuhan Proses dan Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	0,00	-	0,00	-	100	1.074.297.701	-	19.792.800	50	221.379.900	100	210.928.100	-	230.538.000	-	682.638.800	0,00%	63,54%	0,00	682.638.800	0,00%	0,00%
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Dokumen Pokir DPRD (Buku)	0,00	-	0,00	-	2	1.074.297.701	-	19.792.800	1	221.379.900	-	210.928.100	1	230.538.000	1	682.638.800	50,00%	63,54%	1,00	682.638.800	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	0,00	-	0,00	-	100	14.048.620.198	-	1.897.355.018	36	2.836.948.006	98	1.932.048.333	-	2.677.681.208	-	9.344.032.565	0,00%	66,51%	0,00	9.344.032.565	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	0,00	-	0,00	-	1102	14.048.620.198	376	1.897.355.018	788	2.836.948.006	1.051	1.932.048.333	1.452	2.677.681.208	1.452	9.344.032.565	131,76%	66,51%	1452,00	9.344.032.565	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									109,40%		63,68%				
										Predikat Kinerja									Sangat Tinggi		Rendah				
								63.394.799.817		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									120,72%		79,05%				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									Sangat Tinggi		Tinggi				

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN I
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	23,52%	17.000.000,00	3,41%	0,00%	2.467.500,00	3,41%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	25,00%	1.208.403.612,00	19,56%	1,54%	945.524.802,00	19,56%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	60,14%	10.576.875,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	37,51%	15.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	152.000.000,00	55,88%	0,14%	84.937.996,00	55,88%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	12,21%	0,00%	1.380.000,00	12,21%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	86,83%	1.425.425.000,00	41,14%	1,10%	675.370.983,00	41,14%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	789.167.449,00	14,23%	0,18%	112.285.793,00	14,23%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	66,88%	141.300.600,00	28,19%	0,10%	59.564.475,00	28,19%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	25,39%	247.294.350,00	22,20%	0,35%	216.257.040,00	22,20%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	66,36%	145.980.000,00	8,03%	0,03%	17.676.000,00	8,03%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	62,19%	126.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.370.000,00	4,38%	0,00%	2.909.800,00	4,38%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	194.888.344,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	190.955.908,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	25,86%	6.401.503.059,00	29,80%	12,05%	7.378.013.356,00	29,80%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	191.518.250,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	48,72%	15.426.574,00	5,84%	0,00%	1.850.000,00	5,84%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	57,03%	341.549.284,00	7,27%	0,07%	43.530.000,00	7,27%	Tidak Ada	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	42,74%	62.300.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	31,45%	2.122.500.000,00	3,30%	0,36%	224.461.740,00	3,33%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	45,36%	4.443.571,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	97,60%	200.937.438,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	43,57%	38.607.213,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	50,31%	54.666.296,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	1.264.425.000,00	10,17%	0,21%	128.533.800,00	10,17%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	46,69%	357.854.746,00	2,37%	0,03%	18.152.276,00	2,37%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	36,87%	149.495.000,00	20,72%	0,14%	84.000.000,00	20,72%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	35,92%	107.637.492,00	22,43%	0,11%	67.200.000,00	22,43%	Tidak Ada	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	41,41%	766.190.341,00	1,07%	0,03%	19.792.800,00	1,07%	Tidak Ada	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	25,08%	3.504.367.547,00	13,58%	3,10%	1.897.355.018,00	13,58%	Tidak Ada	
		61.202.812.673	63.394.799.817	32,28%	20.465.508.126		19,57%	11.981.263.379	19,58%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN II
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	47,04%	34.000.000,00	3,41%	0,00%	2.467.500,00	3,41%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	66,67%	3.222.409.632,00	43,28%	3,42%	2.092.227.059,00	43,28%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	89,03%	15.656.780,00	36,92%	0,01%	6.493.500,00	36,92%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	74,96%	29.972.638,00	23,03%	0,02%	9.210.300,00	23,03%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	152.000.000,00	55,88%	0,14%	84.937.996,00	55,88%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	91,18%	0,02%	10.308.332,00	91,18%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	55,00%	0,03%	16.174.650,00	54,66%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	100,00%	1.641.575.000,00	72,52%	1,95%	1.190.549.495,00	72,52%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	789.167.449,00	30,09%	0,39%	237.465.442,00	30,09%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	100,00%	211.290.600,00	56,37%	0,19%	119.101.405,00	56,37%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	39,40%	0,01%	6.399.157,00	39,40%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	50,78%	494.588.700,00	46,71%	0,74%	454.982.680,00	46,71%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	100,00%	219.994.580,00	17,90%	0,06%	39.372.000,00	17,90%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	100,00%	202.596.117,00	36,96%	0,12%	74.884.750,00	36,96%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.370.000,00	11,11%	0,01%	7.374.800,00	11,11%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	194.888.344,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	190.955.908,00	2,57%	0,01%	4.905.000,00	2,57%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	64,74%	16.026.974.824,00	44,59%	18,04%	11.039.435.887,00	44,59%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	191.518.250,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	75,53%	23.918.537,00	10,39%	0,01%	3.290.000,00	10,39%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	81,92%	490.652.732,00	26,37%	0,26%	157.925.000,00	26,37%	Tidak Ada	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	71,15%	103.713.255,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	62,92%	4.245.600.519,00	6,43%	0,71%	433.967.636,00	6,43%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	75,98%	7.443.571,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	100,00%	205.878.503,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	77,43%	68.607.213,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	83,44%	90.666.296,00	10,96%	0,02%	11.911.700,00	10,96%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	1.264.425.000,00	42,07%	0,87%	531.929.600,00	42,07%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	74,77%	573.051.108,00	13,98%	0,18%	107.158.276,00	13,98%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	68,43%	277.495.000,00	41,43%	0,27%	168.000.000,00	41,43%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	67,96%	203.637.492,00	46,20%	0,23%	138.442.500,00	46,20%	Tidak Ada	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	71,77%	1.328.005.341,00	13,03%	0,39%	241.172.700,00	13,03%	Tidak Ada	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	50,27%	7.024.735.094,00	33,88%	7,74%	4.734.303.024,00	33,88%	Tidak Ada	
		61.202.812.673	63.394.799.817	62,69%	39.743.512.660		35,82%	21.924.390.389	35,82%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN III
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	83,40%	60.272.104,00	18,72%	0,02%	13.525.900,00	18,72%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	91,67%	4.430.813.244,00	68,44%	5,41%	3.308.305.978,00	68,44%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	100,00%	17.586.898,00	36,92%	0,01%	6.493.500,00	36,92%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	100,00%	39.987.385,00	60,98%	0,04%	24.386.300,00	60,98%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	152.000.000,00	60,64%	0,15%	92.169.006,00	60,64%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	91,18%	0,02%	10.308.332,00	91,18%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	54,78%	0,02%	13.469.710,00	54,78%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	58,56%	0,03%	17.328.650,00	58,56%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	100,00%	1.641.575.000,00	94,36%	2,53%	1.548.948.084,00	94,36%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	789.167.449,00	66,81%	0,86%	527.238.442,00	66,81%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	100,00%	211.290.600,00	89,89%	0,31%	189.929.407,00	89,89%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	39,40%	0,01%	6.399.157,00	39,40%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	76,17%	741.883.050,00	70,67%	1,12%	688.292.620,00	70,67%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	100,00%	219.994.580,00	45,24%	0,16%	99.533.326,00	45,24%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	100,00%	202.596.117,00	59,56%	0,20%	120.658.300,00	59,56%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.370.000,00	11,11%	0,01%	7.374.800,00	11,11%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	194.888.344,00	58,00%	0,18%	113.030.000,00	58,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	190.955.908,00	2,57%	0,01%	4.905.000,00	2,57%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	90,15%	22.316.757.883,00	68,48%	27,70%	16.952.480.620,00	68,48%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	191.518.250,00	100,00%	0,31%	170.900.900,00	89,23%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	93,68%	29.666.291,00	19,55%	0,01%	6.190.000,00	19,55%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	96,11%	575.627.022,00	62,24%	0,61%	372.795.000,00	62,24%	Tidak Ada	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	84,87%	123.713.255,00	0,66%	0,00%	962.000,00	0,66%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	79,00%	5.330.469.090,00	36,23%	3,99%	2.444.813.901,00	36,23%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	100,00%	9.796.309,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	100,00%	205.878.503,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	100,00%	88.607.213,00	16,17%	0,02%	14.325.400,00	16,17%	Tidak Ada	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	100,00%	108.666.296,00	13,65%	0,02%	14.827.700,00	13,65%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	1.264.425.000,00	56,85%	1,17%	718.840.547,00	56,85%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	97,06%	743.862.014,00	30,65%	0,38%	234.934.026,00	30,65%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	100,00%	405.495.000,00	62,15%	0,41%	252.000.000,00	62,15%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	100,00%	299.637.492,00	68,63%	0,34%	205.642.500,00	68,63%	Tidak Ada	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	74,42%	1.377.005.341,00	24,43%	0,74%	452.100.800,00	24,43%	Tidak Ada	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	75,23%	10.512.102.641,00	47,71%	10,89%	6.666.351.357,00	47,71%	Tidak Ada	
		61.202.812.673	63.394.799.817	83,12%	52.694.332.456		57,71%	35.299.461.263	57,68%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2022
TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.272.104,00	72.272.104,00	100,00%	72.272.104,00	37,34%	0,04%	26.984.500,00	37,34%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.614.428,00	5.053.614.428,00	100,00%	5.053.614.428,00	100,00%	7,97%	4.466.601.769,00	88,38%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.586.898,00	17.586.898,00	100,00%	17.586.898,00	74,68%	0,02%	13.133.100,00	74,68%	Tidak Ada	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.987.385,00	39.987.385,00	100,00%	39.987.385,00	62,27%	0,04%	24.898.300,00	62,27%	Tidak Ada	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	152.000.000,00	323.500.000,00	100,00%	323.500.000,00	31,51%	0,16%	101.948.786,00	31,51%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.304.939,00	11.304.939,00	100,00%	11.304.939,00	91,18%	0,02%	10.308.332,00	91,18%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.586.745,00	24.586.745,00	100,00%	24.586.745,00	58,17%	0,02%	14.301.710,00	58,17%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.591.393,00	29.591.393,00	100,00%	29.591.393,00	58,56%	0,03%	17.328.650,00	58,56%	Tidak Ada	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.641.575.000,00	2.141.497.250,00	100,00%	2.141.497.250,00	96,91%	3,27%	2.075.250.765,00	96,91%	Tidak Ada	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	789.167.449,00	1.172.858.967,00	100,00%	1.172.858.967,00	80,63%	1,49%	945.727.522,00	80,63%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.290.600,00	311.290.912,00	100,00%	311.290.912,00	83,14%	0,41%	258.810.236,00	83,14%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.241.100,00	16.241.100,00	100,00%	16.241.100,00	86,41%	0,02%	14.034.157,00	86,41%	Tidak Ada	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.967.400,00	973.967.400,00	100,00%	973.967.400,00	94,43%	1,45%	919.702.560,00	94,43%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.994.580,00	234.833.680,00	100,00%	234.833.680,00	71,05%	0,26%	166.848.226,00	71,05%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.596.117,00	215.925.851,00	100,00%	215.925.851,00	70,98%	0,24%	153.256.300,00	70,98%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.370.000,00	66.670.000,00	100,00%	66.670.000,00	50,28%	0,05%	33.519.800,00	50,28%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.888.344,00	190.939.534,00	100,00%	190.939.534,00	72,16%	0,22%	137.780.000,00	72,16%	Tidak Ada	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.955.908,00	202.500.720,00	100,00%	202.500.720,00	64,29%	0,21%	130.180.000,00	64,29%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.756.352.220,00	24.756.352.220,00	100,00%	24.756.352.220,00	91,86%	35,87%	22.740.993.779,00	91,86%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	191.518.250,00	405.193.250,00	100,00%	405.193.250,00	100,00%	0,64%	325.775.900,00	80,40%	Tidak Ada	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	83,00%	0,09%	57.957.000,00	82,80%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD										
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	31.666.291,00	33.554.289,00	100,00%	33.554.289,00	28,08%	0,01%	9.423.000,00	28,08%	Tidak Ada	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.944.436,00	798.744.436,00	100,00%	798.744.436,00	95,47%	1,20%	762.574.000,00	95,47%	Tidak Ada	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	145.760.449,00	85.760.449,00	100,00%	85.760.449,00	4,16%	0,01%	3.567.000,00	4,16%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.747.839.270,00	6.997.821.500,00	100,00%	6.997.821.500,00	60,79%	6,71%	4.254.200.386,00	60,79%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	9.796.309,00	9.796.309,00	100,00%	9.796.309,00	27,01%	0,00%	2.645.800,00	27,01%	Tidak Ada	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	205.878.503,00	205.878.503,00	100,00%	205.878.503,00	75,56%	0,25%	155.566.200,00	75,56%	Tidak Ada	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	88.607.213,00	94.394.280,00	100,00%	94.394.280,00	40,72%	0,06%	38.438.200,00	40,72%	Tidak Ada	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan										
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	108.666.296,00	67.398.169,00	100,00%	67.398.169,00	22,00%	0,02%	14.827.700,00	22,00%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.264.425.000,00	2.164.425.000,00	100,00%	2.164.425.000,00	52,32%	1,79%	1.132.384.097,00	52,32%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	766.412.015,00	778.261.715,00	100,00%	778.261.715,00	59,97%	0,74%	466.744.776,00	59,97%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	405.495.000,00	405.495.000,00	100,00%	405.495.000,00	82,86%	0,53%	336.000.000,00	82,86%	Tidak Ada	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	299.637.492,00	299.637.492,00	100,00%	299.637.492,00	91,06%	0,43%	272.842.500,00	91,06%	Tidak Ada	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.850.353.341,00	1.074.297.701,00	100,00%	1.074.297.701,00	63,54%	1,08%	682.638.800,00	63,54%	Tidak Ada	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.973.470.198,00	14.048.620.198,00	100,00%	14.048.620.198,00	66,51%	14,74%	9.344.032.565,00	66,51%	Tidak Ada	
		61.202.812.673	63.394.799.817	100,00%	63.394.799.817		80,10%	50.111.226.416	79,05%		

No	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	No	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)	
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT
								Persentasi Fasilitas Pembahasan rancangan Perda		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Melaksanakan fasilitasi pembahasan Raperda	Jumlah fasilitas pembahasan Raperda yang difasilitasi		85.760.449	
										Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					
										Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					
										Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik					
										Pembahasan Kebijakan Anggaran	melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Jumlah fasilitas pembahasan raperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu		94.394.280	
										Pembahasan APBD					
								Persentasi kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	melaksanakan fasilitasi layanan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	jumlah kegiatan pengawasan DPRD yang difasilitasi		67.398.169	
										Pengawasan Penggunaan Anggaran					
								Persentasi kegiatan Reses yang dilaksanakan		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Melaksanakan fasilitasi hearing dan penyerapan aspirasi	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang		1.074.297.701	
										Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah hearing/dialog dengan			



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21863

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 38 /SET.DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
 - b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
 - d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;

- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan Bagian terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal 9 Januari 2023



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Pembina TK. I (IV/b)
NIP.196803041998031009

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
 NOMOR : 38 /SET.DPRD/2023
 TANGGAL : 9 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Keuangan	Ketua
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum dan Humas	Anggota
5.	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Anggota



SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TANAH LAUT,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si

Pembina TK. I (IV/b)
 NIP.196803041998031009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Telp (0512) 21863

K E P U T U S A N
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 4.b/SET.DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 4 Januari 2022.



Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,










LUFFIATI UYUN. M. Pd
NIP. 19620622 1987 2 002

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : Nomor 05 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Januari 2022

A. INFORMASI PROSEDUR

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p>SEKRETARIAT DPRD</p>	Nomor SOP	
		Tgl pembuatan sebelum disahkan	
		Tgl ujicoba	
		Tgl Pengesahan	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dasar Hukum		Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;		<ol style="list-style-type: none">Tim Penyusunan Lakip terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf PendukungKualifikasi anggota tim pemyusunan Lakip adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi KomputerPeningkatan kompetensi tim penyusun LAKIPHasil penyusunan Lakip adalah berupa laporan Lakip SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD	
Identifikasi Risiko		Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">Keterbatasan pengetahuan tim penyusunPeraturan yang selalu berubah (dinamis)Tidak lengkapnya data yang diperlukan			

B.URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Sekretaris	Kabag Keuangan	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun SKPD Lakip					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Sekretaris					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip	
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Sekretris					Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun Lakip SKPD ditandatangani Sekretaris	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi					Jadwal/agenda kerja dan matrik (cheklitst)materi/bahan penyusuna Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip	
5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD					Data dan informasi (tupoksi,struktur tata laksana, kepegawaian).ren stra,IKU,RKT,RK A,Lakip thn sebelumnya dan info lainnya	7 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	



6	Analisis				Gambaran tupokasi,SDM,kin erja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis,visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,progra m/kegiatan/indika tor kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis, Teridentifikasi program/kegiatan yang beroreantasi hasil	
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD				Draf rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD				Naskah Rancangan Lakip SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan Lakip SKPD(visi misi ,keselerasantujuan,sasa ran,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD				Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Sekretris	
10	Penetapan Lakip SKPD				Lakip yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh Sekretaris, dan dilakukan penggandaan dokumen oleh Sekretariat	